



PUTUSAN

Nomor 25/PID.SUS-TPK/2024/PT KDI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang mengadili perkara pidana korupsi dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **JAMALUDDIN, S.Sos Alias JAMAL Bin FARUKI.**
2. Tempat lahir : Pakkasalo
3. Umur/tanggal lahir : 50 Tahun / 31 Desember 1973
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Belibis No. 31 Kel. Laloeha Kec. Kolaka Kab. Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta (Pimpinan Cabang Kolaka PT. MONODON PILAR NUSANTARA);

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan
2. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kolaka Utara di Rutan Kelas IIA Kendari sejak tanggal 6 Mei 2024 sampai dengan tanggal 25 Mei 2024;
3. Perpanjangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari di Rutan Kelas IIA Kendari sejak tanggal 15 Mei 2024 sampai dengan tanggal 13 Juni 2024;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kendari di Rutan Kelas IIA Kendari sejak tanggal 14 Juni 2024 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2024.
5. Perpanjangan Pertama Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara sejak tanggal 13 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 11 September 2024.

Halaman 1 dari 68 halaman Putusan Nomor 25.PID.SUS-TPK/2024/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan Kedua Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara sejak tanggal 12 September 2024 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2024.
7. Penetapan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara sejak tanggal 7 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 5 November 2024.
8. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara sejak tanggal 6 November 2024 sampai dengan tanggal 4 Januari 2025.

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum Abdur Razak, S.H. dan Khaerul Muthmainna, S.H., masing masing Advokat dan Penasehat Hukum tempat kedudukan di Jalan Garuda Nomor 17 Kelurahan Lamokato Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka Propinsi Sulawesi Tenggara berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah diregister pada pengadilan Negeri Kendari Nomor 381/Pid/2024/PN.Kdi tanggal 17 Mei 2024 dan pada tanggal 16 Juli 2024 menambah Penasehat Hukum yakni Syam Rizal,S.H

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari karena didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Reg. Perkara Nomor : PDS-02/P.3.16/Ft.1/05/2024 tanggal 13 Mei 2024 yang merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini, yaitu pada pokoknya sebagai berikut :

KESATU

PRIMAIR

Perbuatan Terdakwa **JAMALUDDIN, S.Sos Alias JAMAL Bin FARUKI** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Ayat (1) Huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana).

Halaman 2 dari 68 halaman Putusan Nomor 25.PID.SUS-TPK/2024/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SUBSIDIAIR :

Perbuatan Terdakwa **JAMALUDDIN, S.Sos Alias JAMAL Bin FARUKI** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana).

ATAU

KEDUA

Perbuatan terdakwa **JAMALUDDIN, S.Sos Alias JAMAL Bin FARUKI** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana).

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor 25/PID.SUS-TPK/2024/PT KDI tanggal 16 Oktober 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;

Membaca Penunjukan oleh Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor 25/PID.SUS-TPK/2024/PT KDI tanggal 16 Oktober 2024 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;

Membaca Penetapan Hakim Nomor 25/PID.SUS-TPK/2024/PT KDI tanggal 16 Oktober 2024 tentang Penetapan hari sidang;

Membaca Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 3 dari 68 halaman Putusan Nomor 25.PID.SUS-TPK/2024/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kolaka Utara Nomor Reg Perkara : PDS-02/P.3.16/Ft.1/05/2024 tanggal 20 Agustus 2024 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **JAMALUDDIN, S.Sos Alias JAMAL Bin FARUKI**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat 1 huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi** sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana) sebagaimana dalam **DAKWAAN PRIMAIR**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **JAMALUDDIN, S.Sos. Alias JAMAL Bin FARUKI**, dengan **Pidana Penjara Selama 9 (sembilan) Tahun dan 6 (enam) Bulan** dengan dikurangkan masa penahanan yang telah dijalankan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan Pidana Denda sebesar **Rp 200.000.000 (Dua ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **6 (Enam) Bulan**;
3. Menjatuhkan Pidana Tambahan kepada Terdakwa **JAMALUDDIN, S.Sos Alias JAMAL Bin FARUKI** berupa pembayaran uang pengganti sebesar **Rp. 9.206.106.499,78 (Sembilan milyar dua ratus enam juta seratus enam ribu empat ratus sembilan puluh sembilan rupiah tujuh puluh delapan sen)** dengan ketentuan apabila uang pengganti sejumlah tersebut tidak dibayar paling lama dalam waktu **1 (satu) bulan** setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dan jika terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana penjara selama **5 (lima) tahun**;
4. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 4 dari 68 halaman Putusan Nomor 25.PID.SUS-TPK/2024/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) bundel FC Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 001/KONTRAK-PPK/DISHUB/XI/2020 tanggal 9 Nopember 2020 pekerjaan Pematangan dan Penyiapan lokasi/lahan Bandar Udara Kolaka Utara;
2. 1 (satu) bundel ASLI Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 002/KONTRAK-PPK/DISHUB/XI/2020 tanggal 9 Nopember 2020 pekerjaan Pengawasan Penyiapan lokasi/lahan Bandar Udara Kolaka Utara;
3. 1 (satu) bundel FC Laporan Akhir PT. Portal Engineering Perkasa;
4. 1 (satu) bundel FC Berita Acara Pembayaran Nomor : 5/BAP-DISHUB/APBD/XI/2020 tanggal 27 Nopember 2020;
5. 1 (satu) lembar FC Surat Permohonan Contract Change Order (CCO) dari PT. MPN kepada PPK;
6. 1 (satu) bundel FC Addendum I (CCO-I) tanggal 2 Maret 2021;
7. 1 (satu) bundel FC Addendum II (Perubahan Nomor Rekening Pembayaran) tanggal 3 Desember 2021;
8. 1 (satu) bundel FC As Built Drawing Pematangan dan Penyediaan lahan/lokasi Bandar Udara Kolaka Utara TA. 2020/2021.
9. 1 (satu) bundel FC Rekapitulasi Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dari PPK;
10. 1 (satu) bundel FC sertifikat Lokasi Bandar Udara Kolaka Utara;
11. 1 (satu) bundel FC Formulir Standar untuk perekaman Analisa masing-masing harga satuan;
12. 1 (satu) bundel FC Daftar Kuantitas dan Harga Engineer Estimate (EE);
13. 1 (satu) bundel FC Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pekerjaan Multiyears TA 2020/2021;
14. 1 (satu) bundel FC Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya (RAB) – Penyusunan Rincian Teknik Terinci (RTT);
15. 1 (satu) lembar FC Sertifikat Ahli Pengadaan Nasional Atas Nama Sofyan, ST.
16. 1 (satu) Bundel FC Petikan Keputusan Bupati Kolaka Utara Nomor : 821.2/10 Tahun 2017; (Pengangkatan Sofyan, ST., MM sebagai

Halaman 5 dari 68 halaman Putusan Nomor 25.PID.SUS-TPK/2024/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasubag Keuangan dan Penyusunan Program Dinas Perhubungan);

17. 1 (satu) Bundel FC Keputusan Kepala Dinas Perhubungan selaku Pengguna Anggaran Nomor 800/001.1/2020 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten Kolaka Utara atas nama Sofyan, ST;
18. 1 (satu) Bundel FC surat keterangan tanggung jawab mutlak (SKTJM).
19. 1 (satu) Bundel FC Surat tinjauan perubahan pekerjaan lapangan nomor :001/PPL/2021 Tanggal 23 Februari 2021;
20. 1 (satu) Lembar FC Surat Persetujuan Kelayakan Lokasi Bandar Udara Baru Kab. Kolaka Utara;
21. 1 (satu) Bundel FC Kepmen Nomor 58 Tahun 2021 Tentang Penetapan Lokasi Bandar Udara Di Kolut;
22. 1 (satu) Lembar FC Surat Tugas Rusli Pt Portal;
23. 1 (satu) Bundel FC Kontrak Penyusunan RTT BANDARA KOLUT;
24. 1 (satu) Bundel ASLI Laporan Akhir Pekerjaan Studi Kelayakan Pemilihan Lokasi dan Rencana Induk Bandar Udara Baru;
25. 1 (satu) Lembar FC Struktur Organisasi Dinas Perhubungan 2020 dan 2021;
26. 1 (satu) Bundel FC Peraturan Bupati Kolaka UTARA Nomor 49 Tahun 2015 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kab. Kolaka Utara;
27. 1 (satu) bundel FC Laporan Harian PT. Monodon Pilar Nusantara dari tanggal 16 Nopember 2020 s/d tanggal 24 Nopember 2021;
28. 1 (satu) Bundel FC Surat Pernyataan PT. Agsya Karya Sejahtera tanggal 24 September 2021; (satu group/management keuangan);
29. 1 (satu) Bundel FC Surat Pernyataan PT. Agsya Karya Sejahtera tanggal 16 Juni 2020; (satu group/management keuangan);
30. 1 (satu) Bundel FC Akta Notaris Pembukaan Kantor Cabang dan Pemberian Kuasa PT. MPN No. 15 tanggal 25 Agustus 2020;
31. 1 (satu) Bundel FC bukti penyetoran kelebihan pembayaran atas Pekerjaan Pematangan/Penyediaan Lokasi Bandar Udara Kolaka

Halaman 6 dari 68 halaman Putusan Nomor 25.PID.SUS-TPK/2024/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara pada Dinas Perhubungan Kabupaten Kolaka Utara T.A. 2021 oleh PT. MPN sejumlah Rp.788.885.920,-;

32. 1 (satu) bundel ASLI Laporan Pengawasan Teknis Pekerjaan CV. Nur Saleh Abadi;
33. 1 (satu) bundel ASLI Surat Perjanjian (Kontrak Tahap I) Nomor : 002.1/KONTRAK-PPK/DISHUB/XI/2020 tanggal 9 Nopember 2020;
34. 1 (satu) bundel FC Berita Acara Pembayaran Nomor : 001/BAP-DISHUB/APBD/IV/2021 tanggal 23 April 2021;
35. 1 (satu) bundel FC Laporan Akhir Pekerjaan Pematangan dan Penyediaan lahan/lokasi Bandar Udara Kolaka Utara TA. 2020/2021;
36. 1 (satu) Bundel FC Shop Drawing Pekerjaan Pematangan dan Penyediaan lahan/lokasi Bandar Udara Kolaka Utara TA. 2020/2021 Kontraktor PT. MPN;
37. 1 (satu) bundel FC Laporan Hasil Pengujian tanggal 24 Pebruari 2022;
38. 1 (satu) bundel FC Laporan Hasil Pengujian tanggal 26 Pebruari 2021;
39. 1 (satu) bundel FC Rekapitulasi Kuantitas dan Harga dari Konsultan Pengawas CV. Nur Saleh Abadi;
40. 1 (satu) bundel FC Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Pemborongan SUBKONTRAK Nomor : 01/MPN/SUBKON/II/2021 tanggal 19 Januari 2021;
41. 1 (satu) bundel ASLI Rekening Koran Giro Bank Sultra atas nama CV. Mallebu periode 01 Nopember 2021 s/d 31 Desember 2021;
42. 1 (satu) Bundel FC Mutual Check 100 % tanggal 17 Nopember 2021 dan Mutual Check 50 % tanggal 22 Juli 2021;
43. 1 (satu) Bundel FC Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Subkontrak dari Masdar selaku Direktur CV. Mallebu kepada Jamaluddin, S.Sos selaku Pimpinan Cabang PT. MPN tanggal 19 Nopember 2021;
44. 1 (satu) bundel FC Sertifikat Produksi Voncrete Corrugated Sheet Pile yang dipesan oleh PT. MPN kepada PT. Wijaya Karya Beton, Tbk.;

Halaman 7 dari 68 halaman Putusan Nomor 25.PID.SUS-TPK/2024/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

45. 1 (satu) lembar FC Penawaran harga sheet pile dari PT. Wika Beton kepada PT. MPN tanggal 28 Desember 2020;
46. 1 (satu) bundel FC Surat Perjanjian Jual Beli pengadaan sheet pile Nomor : TP.02.01/WB-1F.002/21 tanggal 12 Januari 2021;
47. 1 (satu) bundel Fc Amandemen Pertama Surat Perjanjian Jual Beli pengadaan sheet pile Nomor : TP.02.01/WB-1F.002/21.P1 tanggal 9 Pebruari 2021;
48. 1 (satu) bundel Fc Berita Acara Serah Terima pekerjaan pengadaan corrugated dheet pile tanggal 13 Agustus 2021;
49. 1 (satu) bundel Fc Monitor Pembayaran Termyn sheet pile dan bukti transfer kepada PT. Wika Beton dari Agus Salim;
50. 1 (satu) bundel Fc Surat Pengantar Dokumen Nomor : SE.01.01/WB-1F.0009/2021 kepada PT. MPN tanggal 18 Januari 2021;
51. 1 (satu) bundel Fc Surat Pengantar Dokumen Nomor :Se.01.01/WB-1F 0232/2021 kepada PT. MPN tanggal 27 Mei 2021;
52. 1 (satu) lembar Surat dari PT. Wika Beton kepada Bapak Rais perihal Informasi Harga Produk Sheet Pile WIKA Beton dan Daftar Kuantitas dan Harga Harga Perkiraan Sendiri (HPS);
53. 1 (satu) bundel Fc Surat Perintah Pencairan Dana sejumlah Rp.6.173.834.250,- ke Rekening PT. MPN;
54. 1 (satu) bundel Fc Surat Perintah Pencairan Dana sejumlah Rp.17.492.530.370,- ke Rekening PT. MPN;
55. 1 (satu) bundel Fc Surat Perintah Pencairan Dana sejumlah Rp.17.492.530.380 ke Rekening CV. Mallebu dan Surat Kuasa pengalihan pencairan dana dari PT. MPN kepada CV. Mallebu;
56. 1 (satu) bundel FC Surat Perintah Kerja pemancangan darat Turap Sheet Pile panahan tanah dari Jamaluddin (PT. MPN) kepada Abdul Rahman tanggal 18 Juni 2021;
57. 1 (satu) bundel FC Akta Notaris & PPAT Pendirian Perseroan Komanditer CV. Standard Pile Nomor 2 tanggal 1 April 2003;
58. 1 (satu) Bundel ASLI Summary Report pekerjaan Kontruksi pematangan dan penyiapan lahan/lokasi Bandar Udara Kolaka Utara;

Halaman 8 dari 68 halaman Putusan Nomor 25.PID.SUS-TPK/2024/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

59. 1 (satu) bundel Fc Dokumen Lelang PT. Monodon Pilar Nusantara;
60. 1 (satu) bundel FC Dokumen Lelang PT. Pilar Indonesia;
61. 1 (satu) bundel FC Dokumen PT. Fraya Putri Appanang;
62. 1 (satu) bundel FC Dokumen PT. Cahaya Bangun Indonesia;
63. 1 (satu) bundel FC Dokumen PT. Alam Lintas Indonesia;
64. 1 (satu) bundel FC Dokumen PT. Sukses Karya Bersama Internusa;
65. 1 (satu) lembar FC Sertifikat Ahli Pengadaan Nasional Atas Nama Syahrudin Baso;
66. 1 (satu) bundel FC Keputusan Bupati Kolaka Utara Nomor : 926/292/Tahun 2019 tentang Pembentukan Kelompok Kerja dan Pengangkatan Anggota Kelompok Kerja Pengadaan Barang/Jasa Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Utara;
67. 1 (satu) bundel FC Rincian Penawaran Peserta Lelang Pekerjaan Pematangan dan Penyiapan Lahan/Lokasi Bandar Udara Kolaka Utara;
68. 1 (satu) eksemplar FC Rincian HPS yang tayang pada LPSE;
69. 1 (satu) bundel FC Dokumen Pemilihan untuk Pekerjaan Kontruksi Pematangan dan Penyiapan Lahan/Lokasi Bandar Udara Kolaka Utara;
70. 1 (satu) bundel FC kerangka acuan kerja (KAK) rancangan teknik terinci (RTT) fasilitas sisi darat dan fasilitas sisi udara Bandar udara kolaka utara;
71. 1 (satu) bundel FC standar dokumen pemilihan (dokumen kualifikasi) nomor: 06-LU/PKN/2019 untuk pengadaan terbitan laporan penyusunan RTT sisi udara dan sisi darat;
72. 1 (satu) bundel FC LKPP nomor: 9 tahun 2018 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang/jasa melalui penyedia;
73. 1 (satu) Bundel FC peraturan menteri PUPR RI Nomor: 14 tahun 2020 tentang standard dan pedoman pengadaan jasa kontruksi melalui penyedia;
74. 1 (satu) bundel FC dokumen kualifikasi PT. Portal engineering perkasa;

Halaman 9 dari 68 halaman Putusan Nomor 25.PID.SUS-TPK/2024/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



75. 1 (satu) bundel FC berita acara serah terima dokumen hasil pemilihan pengadaan barang/jasa nomor: 5/P.57/PK/KU/X/2020 tanggal 19 Okt 2020;
76. 1 (satu) bundel FC penyampaian hasil pemilihan pengadaan barang/Jasa nomor: 6.6/PJKN-BPBJ/IX/2019;
77. 5 (lima) bundel Fc Surat Perjanjian Penyewaan Peralatan oleh PT. MPN (Jamaluddin) dengan Dinas PUPR Kolaka Utara;
78. 1 (satu) Lembar ASLI penggunaan alat pada dinas pekerjaan umum dan penataan ruang pada pekerjaan bandara 2021;
79. 1 (satu) Bundel Fc Petikan Keputusan Bupati Kolaka Utara Nomor : 821.2/152 Tahun 2018; (Pengangkatan Ir. Junus, Msi sebagai Kadis Perhubungan);
80. 3 (tiga) bundel ASLI Dokumen Foto-Foto Kegiatan Pekerjaan Pematangan dan Penyiapan Lahan/Lokasi Bandar Udara Kolaka Utara;
81. 1 (satu) lembar FC Permohonan Evaluasi Rencana Teknik Terperinci Bandara Udara Kolut;
82. 1 (satu) Bundel FC Undangan Rapat RTT Via Zoom;
83. 1 (satu) bundel FC Penyampaian Data Tambahan Perencanaan Bandar Udara Baru Kab. Kolut;
84. 1 (satu) Bundel FC Perpres No 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 Sd 2024;
85. 1 (satu) Lembar FC Permohonan Asistensi Dan Presentasi Rtt Sisi Udara Dan Sisi Darat Bandar Udara;
86. 1 (satu) bundel FC SKPD Bandar Udara Tahun 2020;
87. 1 (satu) bundel FC SKPD Bandara Udara Tahun 2021;
88. 1 (satu) bundel FC Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kolaka Utara Nomor 800/001.2/2020 tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Kabupaten Kolaka Utara Tahun Anggaran 2020 atas nama Andi Syamsul Bachri, ST;
89. 1 (satu) bundel FC Berita Acara Pengambilan Sumpah Jabatan Taharuddin Sebagai Kabag Adm Pembangunan;
90. 1 (satu) bundel FC Permendagri 133 Tahun 2018 Ttg TGR;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

91. 1 (satu) bundel FC Kepbupati Tentang Tim Evaluasi Kewajaran Dan Pemborosan;
92. 1 (satu) bundel FC Risalah rapat (komisi II) tentang kegiatan RKA APBD perubahan kabupaten kolaka utara tahun anggaran 2020 atas nama Mustamrin Saleh, SP. 31 agustus 2020;
93. 1 (satu) bundel FC risalah rapat badan anggaran tentang persetujuan pekerjaan multiyear untuk pekerjaan pematangan dan penyiapan lahan/ lokasi Bandar udara kolaka utara tahun 2020-2021 atas nama Buhari, S.kel, M.Si. 10 agustus 2020;
94. 1 (satu) bundel FC risalah rapat badan anggaran TAPD dan tim banggar DPRD kab. Kolaka utara tentang penambahan masa pembayaran pinjaman daerah kab. Kolaka utara pada BPD sultra atas nama Buhari, S.kel. M.Si. 19 Okt 2020;
95. 1 (satu) bundel FC risalah rapat badan anggaran TAPD dan tim banggar DPRD kab. Kolaka utara tentang penambahan masa pembayaran pinjaman daerah kab. Kolaka utara pada BPD daerah sultra atas nama Buhari, S.kel. M.Si. 23 Okt 2020;
96. 1 (satu) bundel FC putusan gubernur sultra nomor : 446 tahun 2019 tentang peresmian pemberhentian dan pengangkatan anggota DPRD kab. Kolaka utara masa jabatan 2019-2024;
97. 1 (satu) bundel FC keputusan DPRD nomor : 06/DPRD/2020 tentang persetujuan penambahan masa pembayaran pinjaman daerah kab. Kolaka utara pada PT. BPD Sultra;
98. 1 (satu) bundel FC surat tugas No. 090/98.8/DPRD-2022 atas nama Buhari, S.Kel., M.Si.;
99. 1 (satu) bundel FC keputusan gubernur sultra nomor: 615 tahun 2019 tentang peresmian pengangkatan pimpinan DPRD kab. Kolaka utara;
100. 1 (satu) bundel FC naskah kesepahaman pekerjaan multiyear nomor:180/142/2020. Nomor:06/DPRD/2020;
101. 1 (satu) bundel FC Berita Acara Persetujuan Pinjaman Daerah Kab. Kolaka Utara Tahun Anggaran 2020 Nomor : 01.a/DPRD/2019;
102. 1 (satu) bundel FC BKAD nomor: 900/213/BKAD-XII/202 tentang permohonan pencairan pinjaman daerah tahap I tahun 2020;

Halaman 11 dari 68 halaman Putusan Nomor 25.PID.SUS-TPK/2024/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



103. 1 (satu) bundel FC BKAD nomor: 900/124/BKAD-IV/2021 tentang permohonan pencairan pinjaman daerah tahap I tahun 2021;
104. 1 (satu) bundel FC BKAD nomor: 900/347/BKAD-VI/2021 tentang permohonan pencairan pinjaman daerah tahap III tahun 2021;
105. 1 (satu) bundel FC sertifikat pertanahan HAK PAKAI nomor: 00003 desa kalu-kaluku;
106. 1 (satu) bundel FC sertifikat pertanahan HAK PAKAI nomor: 00004 desa kalu-kaluku;
107. 1 (satu) bundel FC sertifikat pertanahan HAK PAKAI nomor: 00007 desa Lametuna;
108. 1 (satu) bundel FC sertifikat pertanahan HAK PAKAI nomor: 00008 desa lametuna;
109. 1 (satu) bundel FC sertifikat pertanahan HAK PAKAI nomor: 00009 desa Lametuna;
110. 1 (satu) bundel FC sertifikat pertanahan HAK PAKAI nomor: 00010 desa Lametuna;
111. 1 (satu) bundel FC sertifikat pertanahan HAK PAKAI nomor: 00011 desa Lametuna;
112. 1 (satu) bundel FC sertifikat pertanahan HAK PAKAI nomor: 00012 desa Lametuna;
113. 1 (satu) bundel FC posisi utang kepada lembaga keuangan bank (LKB)-BUMD-jangka menengah per 31 Des 2021;
114. 1 (satu) bundel FC rekap pembayaran langsung Rp. 10.687.267.294,00;
115. 1 (satu) bundel FC rekap pembayaran langsung Rp. 24.368.650.002,00;
116. 1 (satu) bundel FC surat menteri dalam negeri nomor: 979/4949/SJ tentang pertimbangan usulan pinjaman daerah pemerintah kab. Kolaka utara TA 2020;
117. 1 (satu) bundel FC salinan akta notaris A.Widya Arung Raya, S.H., M.Kn tentang perjanjian kredit nomor: 221 tanggal 16 okt 2020;
118. 1 (satu) bundel FC Daftar Nama Pemilik Lahan dan Tanaman Lokasi Tambahan Untuk Pembangunan Bandara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 119.** 1 (satu) bundel FC Petikan Putusan Bupati Kolaka Utara Nomor: 821.2/119 Tahun 2010 Tanggal 03 Juni 2012 Tentang Pengangkatan PNS An Mohammad Fadli, S.T., M.T menjadi Pj. Kasubid, Prasarana Wilayah Bappeda & PM;
- 120.** 1 (satu) bundel FC Petikan Putusan Bupati Kolaka Utara Nomor: 821.2/89 Tahun 2014 Tanggal 18 Maret 2014 Tentang Pengangkatan PNS An Mohammad Fadli, S.T., M.T menjadi Kابد. Fisik dan Prasarana Wilayah BAPPEDA;
- 121.** 1 (satu) bundel FC Petikan Putusan Bupati Kolaka Utara Nomor: 821.2/234 Tahun 2016 Tanggal 30 Desember 2016 Tentang Pengangkatan PNS An Mohammad Fadli, S.T., M.T menjadi Kepala Bidang Infastruktur & Pengembangan Wilayah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- 122.** 1 (satu) bundel FC Petikan Putusan Bupati Kolaka Utara Nomor: 821.2/16 Tahun 2021 Tanggal 20 Januari 2021 Tentang Pengangkatan PNS An Mohammad Fadli, S.T., M.T menjadi Sekertaris pada Perencanaan Pembangunan Daerah;
- 123.** 1 (satu) lembar FC Surat Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia Nomor : B-1021/M.Sesneg/HL.02.02/11/2018 Tanggal 30 November;
- 124.** 1 (satu) bundel FC Peraturan Bupati Kolaka Utara Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab Kolaka Utara;
- 125.** 1 (satu) bundel FC Pemaparan Kesiapan Pembangunan Bandara Kolaka Utara Provinsi Sulawesi Tenggara Dalam Rangka Mendukung Target RPJMN 2020-2024;
- 126.** 1 (satu) FC bundel FC Surat Direktur Jendral Perhubungan Udara Nomor : AU/101/1/15/djpu.dbu.2013 Tanggal 2 Maret 2018 Perihal Tanggapan Terhadap Permohonan Evaluasi dan Persetujuan Kelayakan Bandar Udara Baru;
- 127.** 1 (satu) FC bundel FC Surat Direktur Bandar Udara Nomor : AU/04/0009/DBU/V/2019 Tanggal 14 Mei 2019 Perihal Evaluasi

Halaman 13 dari 68 halaman Putusan Nomor 25.PID.SUS-TPK/2024/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persetujuan Kelayakan Rencana Bandar Udara di Kab. Kolaka Utara;

128. 1 (satu) bundel FC Surat Direktur Bandar Udara Nomor : AU.104/0030/DBU/X/2019 Tanggal 04 Oktober 2019 Perihal Tanggapan Terhadap Permohonan dan Persetujuan Kelayakan Bandar Udara Baru;
129. 1 (satu) bundel FC Keputusan Menteri Perhubungan Nomor SK.3237 Tahun 2020 Tanggal 22 Desember 2020 Tentang Pengangkatan melalui Penyesuaian/Inpassing dalam jabatan fungsional Inspektur Bandar Udara;
130. 1 (satu) lembar FC Surat Bupati Nomor : 014/233/2022 Tanggal 19 September 2022 Permohonan Revisi KM 58 Tahun 2021;
131. 1 (satu) bundel FC Laporan Kemajuan Pekerjaan Pengawasan Teknis Pekerjaan (50%) paket kegiatan Pengawasan Penyiapan Lokasi Lahan Pembangunan Fasilitas Pemerintah;
132. 1 (satu) bundel FC foto dokumentasi Pengawasan Teknis Pekerjaan (50%) paket kegiatan Pengawasan Penyiapan Lokasi Lahan Pembangunan Fasilitas Pemerintah;
133. 1 (satu) bundel FC Berita Acara Pembayaran Nomor : 002/BAP-DISHUB/APBD/VII/2020 Tanggal 26 Juli 2021 Pekerjaan Pengawasan Penyiapan Lokasi/Lahan Pembangunan Fasilitas Pemerintah;
134. 1(satu) lembar ASLI surat Jaminan Uang Muka dari PT. ASURANSI UMUM VIDEI KENDARI (bertanggung jawab kepada PPK Dishub Kolaka Utara) sebagai Penjamin dan CV. NUR SALEH ABADI sebagai terjamin;
135. 1 (satu) bundel FC Laporan Pendahuluan Penyusunan Rincian Teknik Terinci (RTT) Sisi Udara dan Sisi Darat Bandara Kolaka Utara;
136. 1 (satu) bundel ASLI bahan Expose Pembangunan Bandar Udara Kolaka Utara dari Dinas Perhubungan Kolaka Utara;
137. 1 (satu) bundel FC Berita Acara Pembayaran Nomor : 005/BAP-DISHUB/APBD/XII/2019 Pekerjaan Perencanaan Penyusunan

Halaman 14 dari 68 halaman Putusan Nomor 25.PID.SUS-TPK/2024/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Teknik Terinci (RTT) Sisi Udara dan Sisi Darat Bandar Udara Kolaka Utara Lokasi Kec. Kodeoha;

138. 1 (satu) bundel FC Berita Acara Pembayaran Nomor : 002/Tim.Pemerik-Dishub/APBD-P/XII/2018 Tanggal 21 Desember 2018 Pekerjaan Penyusunan Dokumen Oseanografi Bandar Udara Kolaka Utara;
139. 1 (satu) bundel ASLI Berita Acara Pembayaran Nomor 04/BAP-DISHUB/APBD/XI/2020 pekerjaan Penyusunan Dokumen Amdal Bandar Udara Kolaka Utara;
140. 1 (satu) bundel FC Buku 3 Konsep Perbaikan Tanah / Pekerjaan Tanah Paket Pekerjaan Penyusunan Rincian Teknik Terinci (RTT) Sisi Udara dan Sisi Darat Bandar Udara Kolaka Utara Tahun 2019;
141. 1 (satu) bundel ASLI Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan Hidup (KA-ANDAL) Pembangunan Bandar Udara di Desa Kalu-Kaluku dan Desa Lametuna Kec. Kodeoha Kab. Kolaka Utara Tahun 2020;
142. 1 (satu) bundel ASLI Laporan Pra Akhir Pekerjaan Studi Kelayakan Pemilihan Lokasi dan Rencana Induk Bandar Udara Baru Tahun 2013;
143. 1 (satu) bundel ASLI Studi Kelayakan Pemilihan Lokasi dan Rencana Induk Bandar Udara Baru Tahun 2013;
144. 1 (satu) bundel ASLI Laporan Hasil Penyelidikan Geoteknik (Boring/SPT, Sondir/CPT dan Uji Laboratorium) Rencana Pembangunan Bandara Kabupaten Kolaka utara Tahun 2023;
145. 1 (satu) bundel FC Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA SKPD) Dinas Perhubungan Tahun Anggaran 2020;
146. 1 (satu) bundel FC As Built Drawing Bandar Udara Kabupaten Kolaka Utara;
147. 1 (satu) bundel ASLI Buku Kas Umum (BKU) Bendahara Pengeluaran periode 1 Januari 2021 s/d 31 Desember 2021;
148. 1 (satu) bundel ASLI Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KM 58 Tahun 2021 Tentang Penetapan Lokasi

Halaman 15 dari 68 halaman Putusan Nomor 25.PID.SUS-TPK/2024/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandar Udara di Kabupaten Kolaka Utara Provinsi Sulawesi Tenggara;

149. 1 (satu) bundel FC Lampiran Rancangan Matriks Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2020;
150. 1 (satu) bundel FC Album Gambar Studi Kelayakan Pemilihan Lokasi dan Rencana Induk Bandar Udara Baru Tahun 2013;
151. 1 (satu) bundel FC Laporan Pendahuluan Studi AMDAL Pembangunan Bandar Udara Nomor : 823/UN.29.20/PPM/2020 Tanggal 4 Juni 2020 tentang Permohonan Pembayaran Tahap I
152. 1 (satu) bundel ASLI Berita Acara Pembayaran Nomor 007/BAP-DISHUB/APBD/XII/2020 pekerjaan Penyusunan Dokumen Amdal Bandar Udara Kolaka Utara;
153. 1 (satu) bundel ASLI Berita Acara Pembayaran Nomor 03/BAP-DISHUB/APBD/VI/2020 pekerjaan Penyusunan Dokumen Amdal Bandar Udara Kolaka Utara tanggal 22 Juni 2020;
154. 1 (satu) bundel ASLI Berita Acara Pembayaran Nomor 002/KONTRAK-DISHUB/VI/2020 tanggal 3 Juni 2020 pekerjaan Penyusunan Dokumen Amdal Bandar Udara Kolaka Utara;
155. 1 (satu) bundel FC Berita Acara Serah Terima Laporan Final Penyusunan Dokumen Amdal Bandar Udara Kolaka Utara Nomor : 002/BAST-AMDAL/DISHUB/XII/2020;
156. 1 (satu) bundel FC Berita Acara Pembayaran Nomor 01/BAP-DISHUB/APBD/III/2020 tanggal 10 Maret 2020 pekerjaan Penyelidikan Tanah Bandar Udara Kolaka Utara;
157. 1 (satu) bundel FC Buku 2 Penyelidikan / Pekerjaan Tanah Paket Pekerjaan Penyusunan Rincian Teknik Terinci (RTT) Sisi Udara dan Sisi Darat Bandar Udara Kolaka Utara Tahun 2019;
158. 1 (satu) bundel FC Buku 1 Hasil dan Analisa Pengukuran Topografi Paket Pekerjaan Penyusunan Rincian Teknik Terinci (RTT) Sisi Udara dan Sisi Darat Bandar Udara Kolaka Utara Tahun 2019;
159. 1 (satu) bundel ASLI Surat Perjanjian Kerja Sama Nomor : 001/KONT.SWK/DISHUB/APBD/II/2020 Tanggal 30 Januari 2020 Pekerjaan Penyelidikan Tanah Bandar Udara Kolaka Utara Tahun Anggaran 2020;

Halaman 16 dari 68 halaman Putusan Nomor 25.PID.SUS-TPK/2024/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 160.** 1 (satu) bundel FC Addendum-1 Hasil Evaluasi Pekerjaan Tambah/Kurang (CCO-1) tanggal 2 Maret 2021 atas kontrak pekerjaan Pematangan dan Penyiapan Lahan/Lokasi Bandar Udara Kolaka Utara
- 161.** 1 (satu) bundel ASLI Surat Perjanjian (Kontrak Tahap I) Nomor : 001.1/KONTRAK-PPK/DISHUB/XI/2020 pekerjaan Pematangan dan Penyiapan Lahan/Lokasi Bandar Udara Kolaka Utara;
- 162.** 1 (satu) bundel ASLI Laporan Antara Pekerjaan Studi Kelayakan Pemilihan Lokasi dan Rencana Induk Bandar Udara Baru Tahun 2013;
- 163.** 1 (satu) bundel ASLI Keputusan Menteri Perhubungan Tentang Penetapan Lokasi Bandar Udara di Kabupaten Kolaka Utara Provinsi Sulawesi Tenggara;
- 164.** 1 (satu) bundel FC Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024;
- 165.** 1 (satu) bundel ASLI Surat Pernyataan tanah hak milik dan bukan tanah sengketa oleh saudara Syarifuddin B;
- 166.** 2 (dua) bundel ASLI Surat Bupati Kolaka Utara Nomor: 014/253/2023 tanggal 3 Juli 2023 perihal Permohonan Revisi KM 58 Tahun 2021;
- 167.** 3 (tiga) bundel ASLI Surat Bupati Kolaka Utara Nomor : 014/233/2023 tanggal 19 September 2022 perihal Permohonan Revisi KM 58 Tahun 2021;
- 168.** 1 (satu) bundel ASLI buku rekening Bank Mandiri atas nama SOFYAN LAEMA;
- 169.** 1 (satu) bundel FC rekening koran Bank BPD SULTRA atas nama SOFYAN;
- 170.** 1 (satu) unit Laptop Merk Acer Aspire A514-54G warna hitam silver beserta cas;
- 171.** 1 (satu) unit Handphone merk Vivo 1816 warna hitam dengan nomor SIM CARD 085342958009;
- 172.** 1 (satu) unit CPU merk NIMITZ TR 5000 warna hitam ;

Halaman 17 dari 68 halaman Putusan Nomor 25.PID.SUS-TPK/2024/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

173. 1 (satu) Bundel FC rekening koran bank MANDIRI atas nama Ir. Junus;
174. 1 (satu) Bundel FC rekening koran bank BPD SULTRA atas nama Ir. Junus;
175. 1 (satu) unit HP Merk Samsung Galaxy A50s warna hitam dengan SIM CARD 08124212914;
176. 1 (satu) bundel rekening koran Bank Sultra atas nama MONODON PILAR NUSANTARA periode 1 November 2020 s/d 31 Januari 2022
177. 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A33 warna biru muda dengan nomor SIM card 085346143428;
178. 1 (satu) Bundel FC Buku Direksi PT. MONODON PILAR NUSANTARA Kegiatan Pematangan dan Penyiapan Lahan Lokasi Bandar Udara Kolaka Utara;
179. 1 (satu) Bundel Asli Rekapitulasi Kuantitas dan Harga Paket Pengawasan Penyiapan Lokasi Lahan Pembangunan Fasilitas Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara;
180. 1 (satu) bundel ASLI rekening koran Bank SULTRA atas nama SYAHRUDDIN BASO Periode 01 November 2020 s.d 31 Januari 2022;
181. 1 (satu) bundel ASLI rekening koran Bank BRI atas nama SYAHRUDDIN BASO Periode 01 Januari 2022 s.d 31 Januari 2022;
182. 1 (satu) Bundel FC Akta Pendirian PT MONODON PILAR NUSANTARA Nomor 10 tanggal 18 Desember 2014;
183. 1 (Satu) Bundel FC Bukti Penerimaan Negara tanggal 26 Agustus 2021;
184. 1 (satu) Bundel FC Rekening Koran mandiri PT MONODON PILAR NUSANT tanggal 1 Agustus 2020 s/d 31 Oktober 2020;
185. 1 (Satu) Bundel FC Rekening Koran BSI atas nama AHMAD tanggal 01 Januari 2021 s/d 27 Mei 2022;
186. 1 (satu) Bundel FC Peraturan Bupati Kolaka Utara Nomor 9 Tahun 2017 tentang pedoman penataan dan pelaksanaan APBD Kabupaten Kolaka Utara;
187. 1 (satu) Bundel FC Nota Kesepakatan antara pemerintah kabupaten kolaka utara dengan dewan perwakilan rakyat daerah

Halaman 18 dari 68 halaman Putusan Nomor 25.PID.SUS-TPK/2024/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kabupaten kolaka utara nomor : 910/22/2019/08/DPRD/2019
tanggal 15 oktober 2019;

188. 1 (satu) Bundel FC Nota Kesepakatan antara pemerintah kabupaten kolaka utara dengan dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten kolaka utara nomor : 910/17/2020/09/DPRD/2020 tanggal 30 Agustus 2020;

189. 1 (satu) Bundel FC Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2020;

190. 1 (satu) Bundel FC Rencana Kerja Pemerintah Daerah Perubahan Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2020;

191. 1 (satu) bundel FC INVOICE Pekerjaan Pengawasan Penyiapan Lahan Pembangunan Fasilitas Pemerintah Tahun 2020-2021;

192. 1 (satu) bundel FC Rekening Koran BANK SULTRA CV NUR SALEH ABADI CONSULTANT tanggal 01 nopember 2020 s/d 31 januari 2022;

193. 1 (satu) bundel FC Rekening Koran BRI MUSTAKDIR SALEH tanggal 01 november 2020 s/d 31 mei 2022;

194. 1 (satu) Bundel FC Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Tahun Anggaran 2021;

195. 1 (satu) Bundel FC Buku 4 Spesifikasi Teknis Masing-Masing Prasarana paket pekerjaan penyusunan Rincian Teknik Terinci Sisi Udara dan Sisi Darat Bandara Kolaka Utara Tahun 2019;

Dipergunakan dalam berkas perkara atas nama terdakwa Ir. JUNUS, M.Si. Alias Pak JUNUS anak dari SAUL SASO (Alm);

5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima Ribu Rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kdi tanggal 1 Oktober 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

MENGADILI :

1. Menyatakan **Terdakwa Jamaluddin, S.Sos Alias Jamal Bin Faruki** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Halaman **19** dari **68** halaman Putusan Nomor 25.PID.SUS-TPK/2024/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“secara bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi”

sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu Primair;

2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa Jamaluddin, S.Sos Alias Jamal Bin Faruki** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan 5 (lima) bulan dan pidana denda sejumlah Rp200.000.000,00 (Dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
3. Menjatuhkan Pidana Tambahan kepada **Terdakwa Jamaluddin, S.Sos Alias Jamal Bin Faruki** untuk membayar uang pengganti sejumlah **Rp9.201.106.499,78 (Sembilan milyar dua ratus satu juta seratus enam ribu empat ratus sembilan puluh sembilan rupiah tujuh puluh delapan sen)** dan jika **Terpidana Jamaluddin, S.Sos Alias Jamal Bin Faruki** tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dan jika terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun** ;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani **Terdakwa Jamaluddin, S.Sos Alias Jamal Bin Faruki** dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
5. Menetapkan **Terdakwa Jamaluddin, S.Sos Alias Jamal Bin Faruki** tetap ditahan.
6. Menetapkan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum berupa :
 1. 1 (satu) bundel FC Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 001/KONTRAK-PPK/DISHUB/XI/2020 tanggal 9 Nopember 2020 pekerjaan Pematangan dan Penyiapan lokasi/lahan Bandar Udara Kolaka Utara;
 2. 1 (satu) bundel ASLI Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 002/KONTRAK-PPK/DISHUB/XI/2020 tanggal 9 Nopember 2020

Halaman 20 dari 68 halaman Putusan Nomor 25.PID.SUS-TPK/2024/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan Pengawasan Penyiapan lokasi/lahan Bandar Udara Kolaka Utara;

3. 1 (satu) bundel FC Laporan Akhir PT. Portal Engineering Perkasa;
4. 1 (satu) bundel FC Berita Acara Pembayaran Nomor : 5/BAP-DISHUB/APBD/XI/2020 tanggal 27 Nopember 2020;
5. 1 (satu) lembar FC Surat Permohonan Contract Change Order (CCO) dari PT. MPN kepada PPK;
6. 1 (satu) bundel FC Addendum I (CCO-I) tanggal 2 Maret 2021;
7. 1 (satu) bundel FC Addendum II (Perubahan Nomor Rekening Pembayaran) tanggal 3 Desember 2021;
8. 1 (satu) bundel FC As Built Drawing Pematangan dan Penyediaan lahan/lokasi Bandar Udara Kolaka Utara TA. 2020/2021.
9. 1 (satu) bundel FC Rekapitulasi Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dari PPK;
- 10.1 (satu) bundel FC sertifikat Lokasi Bandar Udara Kolaka Utara;
- 11.1 (satu) bundel FC Formulir Standar untuk perekaman Analisa masing-masing harga satuan;
- 12.1 (satu) bundel FC Daftar Kuantitas dan Harga Engineer Estimate (EE);
- 13.1 (satu) bundel FC Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pekerjaan Multiyears TA 2020/2021;
- 14.1 (satu) bundel FC Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya (RAB) – Penyusunan Rincian Teknik Terinci (RTT);
- 15.1 (satu) lembar FC Sertifikat Ahli Pengadaan Nasional Atas Nama Sofyan, ST.
- 16.1 (satu) Bundel FC Petikan Keputusan Bupati Kolaka Utara Nomor : 821.2/10 Tahun 2017; (Pengangkatan Sofyan, ST., MM sebagai Kasubag Keuangan dan Penyusunan Program Dinas Perhubungan);
- 17.1 (satu) Bundel FC Keputusan Kepala Dinas Perhubungan selaku Pengguna Anggaran Nomor 800/001.1/2020 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten Kolaka Utara atas nama Sofyan, ST;
- 18.1 (satu) Bundel FC surat keterangan tanggung jawab mutlak (SKTJM).

Halaman 21 dari 68 halaman Putusan Nomor 25.PID.SUS-TPK/2024/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 19.1 (satu) Bundel FC Surat tinjauan perubahan pekerjaan lapangan nomor :001/PPL/2021 Tanggal 23 Februari 2021;
- 20.1 (satu) Lembar FC Surat Persetujuan Kelayakan Lokasi Bandar Udara Baru Kab. Kolaka Utara;
- 21.1 (satu) Bundel FC Kepmen Nomor 58 Tahun 2021 Tentang Penetapan Lokasi Bandar Udara Di Kolut;
- 22.1 (satu) Lembar FC Surat Tugas Rusli Pt Portal;
- 23.1 (satu) Bundel FC Kontrak Penyusunan RTT BANDARA KOLUT;
- 24.1 (satu) Bundel ASLI Laporan Akhir Pekerjaan Studi Kelayakan Pemilihan Lokasi dan Rencana Induk Bandar Udara Baru;
- 25.1 (satu) Lembar FC Struktur Organisasi Dinas Perhubungan 2020 dan 2021;
- 26.1 (satu) Bundel FC Peraturan Bupati Kolaka UTARA Nomor 49 Tahun 2015 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kab. Kolaka Utara;
- 27.1 (satu) bundel FC Laporan Harian PT. Monodon Pilar Nusantara dari tanggal 16 Nopember 2020 s/d tanggal 24 Nopember 2021;
- 28.1 (satu) Bundel FC Surat Pernyataan PT. Agsyas Karya Sejahtera tanggal 24 September 2021; (satu group/management keuangan);
- 29.1 (satu) Bundel FC Surat Pernyataan PT. Agsyas Karya Sejahtera tanggal 16 Juni 2020; (satu group/management keuangan);
- 30.1 (satu) Bundel FC Akta Notaris Pembukaan Kantor Cabang dan Pemberian Kuasa PT. MPN No. 15 tanggal 25 Agustus 2020;
- 31.1 (satu) Bundel FC bukti penyeteroran kelebihan pembayaran atas Pekerjaan Pematangan/Penyediaan Lokasi Bandar Udara Kolaka Utara pada Dinas Perhubungan Kabupaten Kolaka Utara T.A. 2021 oleh PT. MPN sejumlah Rp.788.885.920,-;
- 32.1 (satu) bundel ASLI Laporan Pengawasan Teknis Pekerjaan CV. Nur Saleh Abadi;
- 33.1 (satu) bundel ASLI Surat Perjanjian (Kontrak Tahap I) Nomor : 002.1/KONTRAK-PPK/DISHUB/XI/2020 tanggal 9 Nopember 2020;
- 34.1 (satu) bundel FC Berita Acara Pembayaran Nomor : 001/BAP-DISHUB/APBD/IV/2021 tanggal 23 April 2021;

Halaman 22 dari 68 halaman Putusan Nomor 25.PID.SUS-TPK/2024/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 35.1 (satu) bundel FC Laporan Akhir Pekerjaan Pematangan dan Penyediaan lahan/lokasi Bandar Udara Kolaka Utara TA. 2020/2021;
- 36.1 (satu) Bundel FC Shop Drawing Pekerjaan Pematangan dan Penyediaan lahan/lokasi Bandar Udara Kolaka Utara TA. 2020/2021 Kontraktor PT. MPN;
- 37.1 (satu) bundel FC Laporan Hasil Pengujian tanggal 24 Pebruari 2022;
- 38.1 (satu) bundel FC Laporan Hasil Pengujian tanggal 26 Pebruari 2021;
- 39.1 (satu) bundel FC Rekapitulasi Kuantitas dan Harga dari Konsultan Pengawas CV. Nur Saleh Abadi;
- 40.1 (satu) bundel FC Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Pemborongan SUBKONTRAK Nomor : 01/MPN/SUBKON/II/2021 tanggal 19 Januari 2021;
- 41.1 (satu) bundel ASLI Rekening Koran Giro Bank Sultra atas nama CV. Mallebu periode 01 Nopember 2021 s/d 31 Desember 2021;
- 42.1 (satu) Bundel FC Mutual Check 100 % tanggal 17 Nopember 2021 dan Mutual Check 50 % tanggal 22 Juli 2021;
- 43.1 (satu) Bundel FC Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Subkontrak dari Masdar selaku Direktur CV. Mallebu kepada Jamaluddin, S.Sos selaku Pimpinan Cabang PT. MPN tanggal 19 Nopember 2021;
- 44.1 (satu) bundel FC Sertifikat Produksi Voncrete Corrugated Sheet Pile yang dipesan oleh PT. MPN kepada PT. Wijaya Karya Beton, Tbk.;
- 45.1 (satu) lembar FC Penawaran harga sheet pile dari PT. Wika Beton kepada PT. MPN tanggal 28 Desember 2020;
- 46.1 (satu) bundel FC Surat Perjanjian Jual Beli pengadaan sheet pile Nomor : TP.02.01/WB-1F.002/21 tanggal 12 Januari 2021;
- 47.1 (satu) bundel Fc Amandemen Pertama Surat Perjanjian Jual Beli pengadaan sheet pile Nomor : TP.02.01/WB-1F.002/21.P1 tanggal 9 Pebruari 2021;
- 48.1 (satu) bundel Fc Berita Acara Serah Terima pekerjaan pengadaan corrugated dheet pile tanggal 13 Agustus 2021;
- 49.1 (satu) bundel Fc Monitor Pembayaran Termyn sheet pile dan bukti transfer kepada PT. Wika Beton dari Agus Salim;
- 50.1 (satu) bundel Fc Surat Pengantar Dokumen Nomor : SE.01.01/WB-1F.0009/2021 kepada PT. MPN tanggal 18 Januari 2021;

Halaman 23 dari 68 halaman Putusan Nomor 25.PID.SUS-TPK/2024/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 51.1 (satu) bundel Fc Surat Pengantar Dokumen Nomor :Se.01.01/WB-1F 0232/2021 kepada PT. MPN tanggal 27 Mei 2021;
- 52.1 (satu) lembar Surat dari PT. Wika Beton kepada Bapak Rais perihal Informasi Harga Produk Sheet Pile WIKA Beton dan Daftar Kuantitas dan Harga Harga Perkiraan Sendiri (HPS);
- 53.1 (satu) bundel Fc Surat Perintah Pencairan Dana sejumlah Rp.6.173.834.250,- ke Rekening PT. MPN;
- 54.1 (satu) bundel Fc Surat Perintah Pencairan Dana sejumlah Rp.17.492.530.370,- ke Rekening PT. MPN;
- 55.1 (satu) bundel Fc Surat Perintah Pencairan Dana sejumlah Rp.17.492.530.380 ke Rekening CV. Mallebu dan Surat Kuasa pengalihan pencairan dana dari PT. MPN kepada CV. Mallebu;
- 56.1 (satu) bundel FC Surat Perintah Kerja pemancangan darat Turap Sheet Pile panahan tanah dari Jamaluddin (PT. MPN) kepada Abdul Rahman tanggal 18 Juni 2021;
- 57.1 (satu) bundel FC Akta Notaris & PPAT Pendirian Perseroan Komanditer CV. Standard Pile Nomor 2 tanggal 1 April 2003;
- 58.1 (satu) Bundel ASLI Summary Report pekerjaan Kontruksi pematangan dan penyiapan lahan/lokasi Bandar Udara Kolaka Utara;
- 59.1 (satu) bundel Fc Dokumen Lelang PT. Monodon Pilar Nusantara;
- 60.1 (satu) bundel FC Dokumen Lelang PT. Pilar Indonesia;
- 61.1 (satu) bundel FC Dokumen PT. Fraya Putri Appanang;
- 62.1 (satu) bundel FC Dokumen PT. Cahaya Bangun Indonesia;
- 63.1 (satu) bundel FC Dokumen PT. Alam Lintas Indonesia;
- 64.1 (satu) bundel FC Dokumen PT. Sukses Karya Bersama Internusa;
- 65.1 (satu) lembar FC Sertifikat Ahli Pengadaan Nasional Atas Nama Syahrudin Baso;
- 66.1 (satu) bundel FC Keputusan Bupati Kolaka Utara Nomor : 926/292/Tahun 2019 tentang Pembentukan Kelompok Kerja dan Pengangkatan Anggota Kelompok Kerja Pengadaan Barang/Jasa Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Utara;
- 67.1 (satu) bundel FC Rincian Penawaran Peserta Lelang Pekerjaan Pematangan dan Penyiapan Lahan/Lokasi Bandar Udara Kolaka Utara;

Halaman 24 dari 68 halaman Putusan Nomor 25.PID.SUS-TPK/2024/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 68.1 (satu) eksemplar FC Rincian HPS yang tayang pada LPSE;
- 69.1 (satu) bundel FC Dokumen Pemilihan untuk Pekerjaan Kontruksi Pematangan dan Penyiapan Lahan/Lokasi Bandar Udara Kolaka Utara;
- 70.1 (satu) bundel FC kerangka acuan kerja (KAK) rancangan teknik terinci (RTT) fasilitas sisi darat dan fasilitas sisi udara Bandar udara kolaka utara;
- 71.1 (satu) bundel FC standar dokumen pemilihan (dokumen kualifikasi) nomor: 06-LU/PKN/2019 untuk pengadaan terbitan laporan penyusunan RTT sisi udara dan sisi darat;
- 72.1 (satu) bundel FC LKPP nomor: 9 tahun 2018 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang/jasa melalui penyedia;
- 73.1 (satu) Bundel FC peraturan menteri PUPR RI Nomor: 14 tahun 2020 tentang standard dan pedoman pengadaan jasa kontruksi melalui penyedia;
- 74.1 (satu) bundel FC dokumen kualifikasi PT. Portal engineering perkasa;
- 75.1 (satu) bundel FC berita acara serah terima dokumen hasil pemilihan pengadaan barang/jasa nomor: 5/P.57/PK/KU/X/2020 tanggal 19 Okt 2020;
- 76.1 (satu) bundel FC penyampaian hasil pemilihan pengadaan barang/Jasa nomor: 6.6/PJKN-BPBJ/IX/2019;
- 77.5 (lima) bundel Fc Surat Perjanjian Penyewaan Peralatan oleh PT. MPN (Jamaluddin) dengan Dinas PUPR Kolaka Utara;
- 78.1 (satu) Lembar ASLI penggunaan alat pada dinas pekerjaan umum dan penataan ruang pada pekerjaan bandara 2021;
- 79.1 (satu) Bundel Fc Petikan Keputusan Bupati Kolaka Utara Nomor : 821.2/152 Tahun 2018; (Pengangkatan Ir. Junus, Msi sebagai Kadis Perhubungan);
- 80.3 (tiga) bundel ASLI Dokumen Foto-Foto Kegiatan Pekerjaan Pematangan dan Penyiapan Lahan/Lokasi Bandar Udara Kolaka Utara;
- 81.1 (satu) lembar FC Permohonan Evaluasi Rencana Teknik Terperinci Bandara Udara Kolut;

Halaman 25 dari 68 halaman Putusan Nomor 25.PID.SUS-TPK/2024/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 82.1 (satu) Bundel FC Undangan Rapat RTT Via Zoom;
- 83.1 (satu) bundel FC Penyampaian Data Tambahan Perencanaan Bandar Udara Baru Kab. Kolut;
- 84.1 (satu) Bundel FC Perpres No 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 Sd 2024;
- 85.1 (satu) Lembar FC Permohonan Asistensi Dan Presentasi Rtt Sisi Udara Dan Sisi Darat Bandar Udara;
- 86.1 (satu) bundel FC SKPD Bandar Udara Tahun 2020;
- 87.1 (satu) bundel FC SKPD Bandara Udara Tahun 2021;
- 88.1 (satu) bundel FC Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kolaka Utara Nomor 800/001.2/2020 tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Kabupaten Kolaka Utara Tahun Anggaran 2020 atas nama Andi Syamsul Bachri, ST;
- 89.1 (satu) bundel FC Berita Acara Pengambilan Sumpah Jabatan Taharuddin Sebagai Kabag Adm Pembangunan;
- 90.1 (satu) bundel FC Permendagri 133 Tahun 2018 Ttg TGR;
- 91.1 (satu) bundel FC Kepbupati Tentang Tim Evaluasi Kewajaran Dan Pemborosan;
- 92.1 (satu) bundel FC Risalah rapat (komisi II) tentang kegiatan RKA APBD perubahan kabupaten kolaka utara tahun anggaran 2020 atas nama Mustamrin Saleh, SP. 31 agustus 2020;
- 93.1 (satu) bundel FC risalah rapat badan anggaran tentang persetujuan pekerjaan multiyear untuk pekerjaan pematangan dan penyiapan lahan/ lokasi Bandar udara kolaka utara tahun 2020-2021 atas nama Buhari, S.kel, M.Si. 10 agustus 2020;
- 94.1 (satu) bundel FC risalah rapat badan anggaran TAPD dan tim banggar DPRD kab. Kolaka utara tentang penambahan masa pembayaran pinjaman daerah kab. Kolaka utara pada BPD sultra atas nama Buhari, S.kel. M.Si. 19 Okt 2020;
- 95.1 (satu) bundel FC risalah rapat badan anggaran TAPD dan tim banggar DPRD kab. Kolaka utara tentang penambahan masa pembayaran pinjaman daerah kab. Kolaka utara pada BPD daerah sultra atas nama Buhari, S.kel. M.Si. 23 Okt 2020;

Halaman 26 dari 68 halaman Putusan Nomor 25.PID.SUS-TPK/2024/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 96.1** (satu) bundel FC putusan gubernur sultra nomor : 446 tahun 2019 tentang peresmian pemberhentian dan pengangkatan anggota DPRD kab. Kolaka utara masa jabatan 2019-2024;
- 97.1** (satu) bundel FC keputusan DPRD nomor : 06/DPRD/2020 tentang persetujuan penambahan masa pembayaran pinjaman daerah kab. Kolaka utara pada PT. BPD Sultra;
- 98.1** (satu) bundel FC surat tugas No. 090/98.8/DPRD-2022 atas nama Buhari, S.Kel., M.Si.;
- 99.1** (satu) bundel FC keputusan gubernur sultra nomor: 615 tahun 2019 tentang peresmian pengangkatan pimpinan DPRD kab. Kolaka utara;
- 100.1** (satu) bundel FC naskah kesepahaman pekerjaan multiyear nomor:180/142/2020. Nomor:06/DPRD/2020;
- 101.1** (satu) bundel FC Berita Acara Persetujuan Pinjaman Daerah Kab. Kolaka Utara Tahun Anggaran 2020 Nomor : 01.a/DPRD/2019;
- 102.1** (satu) bundel FC BKAD nomor: 900/213/BKAD-XII/202 tentang permohonan pencairan pinjaman daerah tahap I tahun 2020;
- 103.1** (satu) bundel FC BKAD nomor: 900/124/BKAD-IV/2021 tentang permohonan pencairan pinjaman daerah tahap I tahun 2021;
- 104.1** (satu) bundel FC BKAD nomor: 900/347/BKAD-VI/2021 tentang permohonan pencairan pinjaman daerah tahap III tahun 2021;
- 105.1** (satu) bundel FC sertifikat pertanahan HAK PAKAI nomor: 00003 desa kalu-kaluku;
- 106.1** (satu) bundel FC sertifikat pertanahan HAK PAKAI nomor: 00004 desa kalu-kaluku;
- 107.1** (satu) bundel FC sertifikat pertanahan HAK PAKAI nomor: 00007 desa Lametuna;
- 108.1** (satu) bundel FC sertifikat pertanahan HAK PAKAI nomor: 00008 desa lametuna;
- 109.1** (satu) bundel FC sertifikat pertanahan HAK PAKAI nomor: 00009 desa Lametuna;
- 110.1** (satu) bundel FC sertifikat pertanahan HAK PAKAI nomor: 00010 desa Lametuna;
- 111.1** (satu) bundel FC sertifikat pertanahan HAK PAKAI nomor: 00011 desa Lametuna;

Halaman **27** dari **68** halaman Putusan Nomor 25.PID.SUS-TPK/2024/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 112.1** (satu) bundel FC sertifikat pertanahan HAK PAKAI nomor: 00012 desa Lametuna;
- 113.1** (satu) bundel FC posisi utang kepada lembaga keuangan bank (LKB)-BUMD-jangka menengah per 31 Des 2021;
- 114.1** (satu) bundel FC rekap pembayaran langsung Rp. 10.687.267.294,00;
- 115.1** (satu) bundel FC rekap pembayaran langsung Rp. 24.368.650.002,00;
- 116.1** (satu) bundel FC surat menteri dalam negeri nomor: 979/4949/SJ tentang pertimbangan usulan pinjaman daerah pemerintah kab. Kolaka utara TA 2020;
- 117.1** (satu) bundel FC salinan akta notaris A.Widya Arung Raya, S.H., M.Kn tentang perjanjian kredit nomor: 221 tanggal 16 okt 2020;
- 118.1** (satu) bundel FC Daftar Nama Pemilik Lahan dan Tanaman Lokasi Tambahan Untuk Pembangunan Bandara;
- 119.1** (satu) bundel FC Petikan Putusan Bupati Kolaka Utara Nomor: 821.2/119 Tahun 2010 Tanggal 03 Juni 2012 Tentang Pengangkatan PNS An Mohammad Fadli, S.T., M.T menjadi Pj. Kasubid, Prasarana Wilayah Bappeda & PM;
- 120.1** (satu) bundel FC Petikan Putusan Bupati Kolaka Utara Nomor: 821.2/89 Tahun 2014 Tanggal 18 Maret 2014 Tentang Pengangkatan PNS An Mohammad Fadli, S.T., M.T menjadi Kabid. Fisik dan Prasarana Wilayah BAPPEDA;
- 121.1** (satu) bundel FC Petikan Putusan Bupati Kolaka Utara Nomor: 821.2/234 Tahun 2016 Tanggal 30 Desember 2016 Tentang Pengangkatan PNS An Mohammad Fadli, S.T., M.T menjadi Kepala Bidang Infrastruktur & Pengembangan Wilayah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- 122.1** (satu) bundel FC Petikan Putusan Bupati Kolaka Utara Nomor: 821.2/16 Tahun 2021 Tanggal 20 Januari 2021 Tentang Pengangkatan PNS An Mohammad Fadli, S.T., M.T menjadi Sekertaris pada Perencanaan Pembangunan Daerah;

Halaman 28 dari 68 halaman Putusan Nomor 25.PID.SUS-TPK/2024/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 123.1** (satu) lembar FC Surat Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia Nomor : B-1021/M.Sesneg/HL.02.02/11/2018 Tanggal 30 November;
- 124.1** (satu) bundel FC Peraturan Bupati Kolaka Utara Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab Kolaka Utara;
- 125.1** (satu) bundel FC Pemaparan Kesiapan Pembangunan Bandara Kolaka Utara Provinsi Sulawesi Tenggara Dalam Rangka Mendukung Target RPJMN 2020-2024;
- 126.1** (satu) FC bundel FC Surat Direktur Jendral Perhubungan Udara Nomor : AU/101/1/15/djpu.dbu.2013 Tanggal 2 Maret 2018 Perihal Tanggapan Terhadap Permohonan Evaluasi dan Persetujuan Kelayakan Bandar Udara Baru;
- 127.1** (satu) FC bundel FC Surat Direktur Bandar Udara Nomor : AU/04/0009/DBU/V/2019 Tanggal 14 Mei 2019 Perihal Evaluasi Persetujuan Kelayakan Rencana Bandar Udara di Kab. Kolaka Utara;
- 128.1** (satu) bundel FC Surat Direktur Bandar Udara Nomor : AU.104/0030/DBU/X/2019 Tanggal 04 Oktober 2019 Perihal Tanggapan Terhadap Permohonan dan Persetujuan Kelayakan Bandar Udara Baru;
- 129.1** (satu) bundel FC Keputusan Menteri Perhubungan Nomor SK.3237 Tahun 2020 Tanggal 22 Desember 2020 Tentang Pengangkatan melalui Penyesuaian/Inpassing dalam jabatan fungsional Inspektur Bandar Udara;
- 130.1** (satu) lembar FC Surat Bupati Nomor : 014/233/2022 Tanggal 19 September 2022 Permohonan Revisi KM 58 Tahun 2021;
- 131.1** (satu) bundel FC Laporan Kemajuan Pekerjaan Pengawasan Teknis Pekerjaan (50%) paket kegiatan Pengawasan Penyiapan Lokasi Lahan Pembangunan Fasilitas Pemerintah;
- 132.1** (satu) bundel FC foto dokumentasi Pengawasan Teknis Pekerjaan (50%) paket kegiatan Pengawasan Penyiapan Lokasi Lahan Pembangunan Fasilitas Pemerintah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 133.1** (satu) bundel FC Berita Acara Pembayaran Nomor : 002/BAP-DISHUB/APBD/VII/2020 Tanggal 26 Juli 2021 Pekerjaan Pengawasan Penyiapan Lokasi/Lahan Pembangunan Fasilitas Pemerintah;
- 134.1** (satu) lembar ASLI surat Jaminan Uang Muka dari PT. ASURANSI UMUM VIDEI KENDARI (bertanggung jawab kepada PPK Dishub Kolaka Utara) sebagai Penjamin dan CV. NUR SALEH ABADI sebagai terjamin;
- 135.1** (satu) bundel FC Laporan Pendahuluan Penyusunan Rincian Teknik Terinci (RTT) Sisi Udara dan Sisi Darat Bandara Kolaka Utara;
- 136.1** (satu) bundel ASLI bahan Expose Pembangunan Bandar Udara Kolaka Utara dari Dinas Perhubungan Kolaka Utara;
- 137.1** (satu) bundel FC Berita Acara Pembayaran Nomor : 005/BAP-DISHUB/APBD/XII/2019 Pekerjaan Perencanaan Penyusunan Rincian Teknik Terinci (RTT) Sisi Udara dan Sisi Darat Bandar Udara Kolaka Utara Lokasi Kec. Kodeoha;
- 138.1** (satu) bundel FC Berita Acara Pembayaran Nomor : 002/Tim.Pemerik-Dishub/APBD-P/XII/2018 Tanggal 21 Desember 2018 Pekerjaan Penyusunan Dokumen Oseanografi Bandar Udara Kolaka Utara;
- 139.1** (satu) bundel ASLI Berita Acara Pembayaran Nomor 04/BAP-DISHUB/APBD/XI/2020 pekerjaan Penyusunan Dokumen Amdal Bandar Udara Kolaka Utara;
- 140.1** (satu) bundel FC Buku 3 Konsep Perbaikan Tanah / Pekerjaan Tanah Paket Pekerjaan Penyusunan Rincian Teknik Terinci (RTT) Sisi Udara dan Sisi Darat Bandar Udara Kolaka Utara Tahun 2019;
- 141.1** (satu) bundel ASLI Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan Hidup (KA-ANDAL) Pembangunan Bandar Udara di Desa Kalu-Kaluku dan Desa Lametuna Kec. Kodeoha Kab. Kolaka Utara Tahun 2020;
- 142.1** (satu) bundel ASLI Laporan Pra Akhir Pekerjaan Studi Kelayakan Pemilihan Lokasi dan Rencana Induk Bandar Udara Baru Tahun 2013;
- 143.1** (satu) bundel ASLI Studi Kelayakan Pemilihan Lokasi dan Rencana Induk Bandar Udara Baru Tahun 2013;

Halaman 30 dari 68 halaman Putusan Nomor 25.PID.SUS-TPK/2024/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 144.1** (satu) bundel ASLI Laporan Hasil Penyelidikan Geoteknik (Boring/SPT, Sondir/CPT dan Uji Laboratorium) Rencana Pembangunan Bandara Kabupaten Kolaka utara Tahun 2023;
- 145.1** (satu) bundel FC Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA SKPD) Dinas Perhubungan Tahun Anggaran 2020;
- 146.1** (satu) bundel FC As Built Drawing Bandar Udara Kabupaten Kolaka Utara;
- 147.1** (satu) bundel ASLI Buku Kas Umum (BKU) Bendahara Pengeluaran periode 1 Januari 2021 s/d 31 Desember 2021;
- 148.1** (satu) bundel ASLI Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KM 58 Tahun 2021 Tentang Penetapan Lokasi Bandar Udara di Kabupaten Kolaka Utara Provinsi Sulawesi Tenggara;
- 149.1** (satu) bundel FC Lampiran Rancangan Matriks Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2020;
- 150.1** (satu) bundel FC Album Gambar Studi Kelayakan Pemilihan Lokasi dan Rencana Induk Bandar Udara Baru Tahun 2013;
- 151.1** (satu) bundel FC Laporan Pendahuluan Studi AMDAL Pembangunan Bandar Udara Nomor : 823/UN.29.20/PPM/2020 Tanggal 4 Juni 2020 tentang Permohonan Pembayaran Tahap I
- 152.1** (satu) bundel ASLI Berita Acara Pembayaran Nomor 007/BAP-DISHUB/APBD/XII/2020 pekerjaan Penyusunan Dokumen Amdal Bandar Udara Kolaka Utara;
- 153.1** (satu) bundel ASLI Berita Acara Pembayaran Nomor 03/BAP-DISHUB/APBD/VI/2020 pekerjaan Penyusunan Dokumen Amdal Bandar Udara Kolaka Utara tanggal 22 Juni 2020;
- 154.1** (satu) bundel ASLI Berita Acara Pembayaran Nomor 002/KONTRAK-DISHUB/VI/2020 tanggal 3 Juni 2020 pekerjaan Penyusunan Dokumen Amdal Bandar Udara Kolaka Utara;
- 155.1** (satu) bundel FC Berita Acara Serah Terima Laporan Final Penyusunan Dokumen Amdal Bandar Udara Kolaka Utara Nomor : 002/BAST-AMDAL/DISHUB/XII/2020;
- 156.1** (satu) bundel FC Berita Acara Pembayaran Nomor 01/BAP-DISHUB/APBD/III/2020 tanggal 10 Maret 2020 pekerjaan Penyelidikan Tanah Bandar Udara Kolaka Utara;

Halaman 31 dari 68 halaman Putusan Nomor 25.PID.SUS-TPK/2024/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 157.1** (satu) bundel FC Buku 2 Penyelidikan / Pekerjaan Tanah Paket Pekerjaan Penyusunan Rincian Teknik Terinci (RTT) Sisi Udara dan Sisi Darat Bandar Udara Kolaka Utara Tahun 2019;
- 158.1** (satu) bundel FC Buku 1 Hasil dan Analisa Pengukuran Topografi Paket Pekerjaan Penyusunan Rincian Teknik Terinci (RTT) Sisi Udara dan Sisi Darat Bandar Udara Kolaka Utara Tahun 2019;
- 159.1** (satu) bundel ASLI Surat Perjanjian Kerja Sama Nomor : 001/KONT.SWK/DISHUB/APBD/II/2020 Tanggal 30 Januari 2020 Pekerjaan Penyelidikan Tanah Bandar Udara Kolaka Utara Tahun Anggaran 2020;
- 160.1** (satu) bundel FC Addendum-1 Hasil Evaluasi Pekerjaan Tambah/Kurang (CCO-1) tanggal 2 Maret 2021 atas kontrak pekerjaan Pematangan dan Penyiapan Lahan/Lokasi Bandar Udara Kolaka Utara
- 161.1** (satu) bundel ASLI Surat Perjanjian (Kontrak Tahap I) Nomor : 001.1/KONTRAK-PPK/DISHUB/XI/2020 pekerjaan Pematangan dan Penyiapan Lahan/Lokasi Bandar Udara Kolaka Utara;
- 162.1** (satu) bundel ASLI Laporan Antara Pekerjaan Studi Kelayakan Pemilihan Lokasi dan Rencana Induk Bandar Udara Baru Tahun 2013;
- 163.1** (satu) bundel ASLI Keputusan Menteri Perhubungan Tentang Penetapan Lokasi Bandar Udara di Kabupaten Kolaka Utara Provinsi Sulawesi Tenggara;
- 164.1** (satu) bundel FC Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024;
- 165.1** (satu) bundel ASLI Surat Pernyataan tanah hak milik dan bukan tanah sengketa oleh saudara Syarifuddin B;
- 166.2** (dua) bundel ASLI Surat Bupati Kolaka Utara Nomor: 014/253/2023 tanggal 3 Juli 2023 perihal Permohonan Revisi KM 58 Tahun 2021;
- 167.3** (tiga) bundel ASLI Surat Bupati Kolaka Utara Nomor : 014/233/2023 tanggal 19 September 2022 perihal Permohonan Revisi KM 58 Tahun 2021;
- 168.1** (satu) bundel ASLI buku rekening Bank Mandiri atas nama SOFYAN LAEMA;

Halaman 32 dari 68 halaman Putusan Nomor 25.PID.SUS-TPK/2024/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 169.1** (satu) bundel FC rekening koran Bank BPD SULTRA atas nama SOFYAN;
- 170.1** (satu) unit Laptop Merk Acer Aspire A514-54G warna hitam silver beserta cas;
- 171.1** (satu) unit Handphone merk Vivo 1816 warna hitam dengan nomor SIM CARD 085342958009;
- 172.1** (satu) unit CPU merk NIMITZ TR 5000 warna hitam ;
- 173.1** (satu) Bundel FC rekening koran bank MANDIRI atas nama Ir. Junus;
- 174.1** (satu) Bundel FC rekening koran bank BPD SULTRA atas nama Ir. Junus;
- 175.1** (satu) unit HP Merk Samsung Galaxy A50s warna hitam dengan SIM CARD 08124212914;
- 176.1** (satu) bundel rekening koran Bank Sultra atas nama MONODON PILAR NUSANTARA periode 1 November 2020 s/d 31 Januari 2022
- 177.1** (satu) unit Handphone merk OPPO A33 warna biru muda dengan nomor SIM card 085346143428;
- 178.1** (satu) Bundel FC Buku Direksi PT. MONODON PILAR NUSANTARA Kegiatan Pematangan dan Penyiapan Lahan Lokasi Bandar Udara Kolaka Utara;
- 179.1** (satu) Bundel Asli Rekapitulasi Kuantitas dan Harga Paket Pengawasan Penyiapan Lokasi Lahan Pembangunan Fasilitas Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara;
- 180.1** (satu) bundel ASLI rekening koran Bank SULTRA atas nama SYAHRUDDIN BASO Periode 01 November 2020 s.d 31 Januari 2022;
- 181.1** (satu) bundel ASLI rekening koran Bank BRI atas nama SYAHRUDDIN BASO Periode 01 Januari 2022 s.d 31 Januari 2022;
- 182.1** (satu) Bundel FC Akta Pendirian PT MONODON PILAR NUSANTARA Nomor 10 tanggal 18 Desember 2014;
- 183.1** (Satu) Bundel FC Bukti Penerimaan Negara tanggal 26 Agustus 2021;
- 184.1** (satu) Bundel FC Rekening Koran mandiri PT MONODON PILAR NUSANT tanggal 1 Agustus 2020 s/d 31 Oktober 2020;

Halaman **33** dari **68** halaman Putusan Nomor 25.PID.SUS-TPK/2024/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 185.1** (Satu) Bundel FC Rekening Koran BSI atas nama AHMAD tanggal 01 Januari 2021 s/d 27 Mei 2022;
- 186.1** (satu) Bundel FC Peraturan Bupati Kolaka Utara Nomor 9 Tahun 2017 tentang pedoman penataan dan pelaksanaan APBD Kabupaten Kolaka Utara;
- 187.1** (satu) Bundel FC Nota Kesepakatan antara pemerintah kabupaten kolaka utara dengan dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten kolaka utara nomor : 910/22/2019/08/DPRD/2019 tanggal 15 oktober 2019;
- 188.1** (satu) Bundel FC Nota Kesepakatan antara pemerintah kabupaten kolaka utara dengan dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten kolaka utara nomor : 910/17/2020/09/DPRD/2020 tanggal 30 Agustus 2020;
- 189.1** (satu) Bundel FC Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2020;
- 190.1** (satu) Bundel FC Rencana Kerja Pemerintah Daerah Perubahan Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2020;
- 191.1** (satu) bundel FC INVOICE Pekerjaan Pengawasan Penyiapan Lahan Pembangunan Fasilitas Pemerintah Tahun 2020-2021;
- 192.1** (satu) bundel FC Rekening Koran BANK SULTRA CV NUR SALEH ABADI CONSULTANT tanggal 01 nopember 2020 s/d 31 januari 2022;
- 193.1** (satu) bundel FC Rekening Koran BRI MUSTAKDIR SALEH tanggal 01 november 2020 s/d 31 mei 2022;
- 194.1** (satu) Bundel FC Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Tahun Anggaran 2021;
- 195.1** (satu) Bundel FC Buku 4 Spesifikasi Teknis Masing-Masing Prasarana paket pekerjaan penyusunan Rincian Teknik Terinci Sisi Udara dan Sisi Darat Bandara Kolaka Utara Tahun 2019;

Dipergunakan dalam berkas perkara atas nama Saksi Ir. Junus, M.Si. Alias Pak Junus Anak Dari Saul Saso (Alm) ,(Terdakwa dalam berkas perkara terpisah).

- 7.** Menetapkan bukti surat yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa berupa :

Halaman **34** dari **68** halaman Putusan Nomor 25.PID.SUS-TPK/2024/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. T-1 : Foto copy Album
Besar RTT Bandar Udara Kabupaten Kolaka Utara Sisi Darat dan Udara,
2. T-2 : Foto copy
Kerangka Acuan Kerja yang memuat Rencana Teknik Terinci (RTT) Fasilitas sisi Darat dan sisi Udara Bandar Udara Kabupaten Kolaka Utara;
3. T-3 : Foto copy
Gambar RTT Pematangan dan Penyiapan Lahan/Lokasi Bandar Udara Kabupaten Kolaka Utara;
4. T-4 : Foto copy
Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kolaka Utara tahun Anggaran 2020 pada Bidang Pemerintahan Perhubungan Unit Organisasi Dinas Perhubungan perihal Kegiatan Penyiapan Lokasi Lahan Pembangunan Fasilitas Pemerintah.
5. T-5 : Foto Copy Surat
Laporan Hasil Pengujian Kuat Tekan Beton Silinder Beton fc'30 oleh pemohon PT. Monodon Pilar Nusantara pada Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Laboratorium Konstruksi,
6. T-6 : Foto copy Surat
Persetujuan Pengawasan dan Pengamanan Proyek Strategis Daerah pada Dinas Perhubungan Kab.Kolaka Utara TA.2021 dan Surat Perintah Pengawasan dan Pengamanan oleh Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara.
7. T-7 : Photo
Pengawasan dan Pengamanan yang dilakukan oleh Tim TP4D pada pengerjaan Pematangan dan Penyiapan Lahan Lokasi Bandar Udara Kabupaten Kolaka Utara;
8. T-8 : Foto copy As
Built Drawing Pematangan dan penyiapan Lahan/Lokasi Banda Udara Kolaka Utara;

Halaman 35 dari 68 halaman Putusan Nomor 25.PID.SUS-TPK/2024/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9.

T-9 : Foto copy Bukti

Kas Biaya perjalanan Dinas TP4D yang terdiri atas :

- a. Nomor 896/GU.215.0.00.0.00.17, pembayaran Biaya perjalanan Dinas dalam rangka koordinasi dan konsultasi tentang pelaksanaan kegiatan Pengamanan dan Pembangunan proyek strategis daerah pada kegiatan pematangan dan penyiapan lahan Lokasi Bandara Kolut an. Rijal Saputra,S.H.(Jaksa);
- b. Nomor 784/ GU.215.0.00.0.00.17, , pembayaran Biaya perjalanan Dinas dalam rangka monitoring dan konsultasi an. Noeradi, S.H.,M.H., /Jaksa Madya, Asisten Bidang Intelejen Kejati Sultra;
- c. Nomor 785 /GU.215.0.00.0.00.17, pembayaran biaya perjalanan dinas dalam rangka monitoring dan konsultasi an Sugiatno Mingano, S.H;
- d. Nomor 786/ GU.215.0.00.0.00.17, pembayaran biaya perjalanan dinas dalam rangka monitoring dan konsultasi an. Salemuddin Thalib, S.H.,M.H., (Jaksa Madya/ Kasi B Bidang Intelejen Kejati Sultra);
- e. Nomor 894/ GU.215.0.00.0.00.17, pembayaran Biaya perjalanan Dinas dalam rangka koordinasi dan konsultasi tentang pelaksanaan kegiatan Pengamanan dan Pembangunan proyek strategis daerah pada kegiatan pematangan dan penyiapan lahan Lokasi Bandara Kolut an. Teguh Imanto, S.H.,M.Hum (Kajari Kolaka Utara);
- f. Nomor 787/ GU.215.0.00.0.00.17, pembayaran Biaya perjalanan Dinas dalam rangka monitoring pekerjaan pematangan dan penyiapan lahan Lokasi Bandara Kolut an. Fadly A.Safaa, S.H.,M.H (Jaksa Muda/ Kasi A Bidang Intelejen Kejati Sultra);
- g. Nomor 895/GU.215.0.00.0.00.17, pembayaran Biaya perjalanan dinas dalam rangka koordinasi dan konsultasi tentang pelaksanaan kegiatan Pengamanan dan Pembangunan proyek strategis daerah pada kegiatan pematangan dan penyiapan lahan Lokasi Bandara Kolut di Kendari an. Toyyib Hasan, S.H.,(Kasi Intelejen Kejari Kolaka Utara);

Halaman 36 dari 68 halaman Putusan Nomor 25.PID.SUS-TPK/2024/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. Nomor 897/ GU.215.0.00.0.00.17, pembayaran Biaya perjalanan dinas dalam rangka koordinasi dan konsultasi tentang pelaksanaan kegiatan Pengamanan dan Pembangunan proyek strategis daerah pada kegiatan pematangan dan penyiapan lahan Lokasi Bandara Kolut di Kendari an. Teguh Imanto, S.H.,M.Hum (Kajari Kolaka Utara);
- i. Nomor 898/ GU.215.0.00.0.00.17, pembayaran Biaya perjalanan dinas dalam rangka koordinasi dan konsultasi tentang pelaksanaan kegiatan Pengamanan dan Pembangunan proyek strategis daerah pada kegiatan pematangan dan penyiapan lahan Lokasi Bandara Kolut di Kendari an. Toyyib Hasan, S.H.,M.H., (Kasi Intelejen Kejari Kolut);
- j. Nomor 899/ GU.215.0.00.0.00.17, pembayaran Biaya perjalanan dinas dalam rangka koordinasi dan konsultasi tentang pelaksanaan kegiatan Pengamanan dan Pembangunan proyek strategis daerah pada kegiatan pematangan dan penyiapan lahan Lokasi Bandara Kolut di Kendari an. Rijal Saputra, S.H., (Ajun Jaksa madya/Kasubsi Ekonomi, Keuangan dan pengamanan pada Kejari Kolut).

10. T-10 : Foto copy Surat Persetujuan Kelayakan Lokasi Bandar Udara Baru di Kabupaten Kolaka Utara;

11. T-11 : Foto Copy Perraturan Presiden Republik Indonesia No. 18 Tajhun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024;

12. T-12 : Foto copy Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia No.KM 58 Tahun 2021 Tentang Penetapan Lokasi Bandar Udara di Kabupaten Kolaka Utara Provinsi Sulawesi Tenggara.

Terlampir dalam berkas perkara.

8. Membebaskan kepada **Terdakwa Jamaluddin, S.Sos Alias Jamal Bin Faruki** membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Halaman 37 dari 68 halaman Putusan Nomor 25.PID.SUS-TPK/2024/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 24/Akta.Pid.Sus-TPK/2024/PN Kdi yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari yang menerangkan bahwa pada tanggal 7 Oktober 2024, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kdi tanggal 1 Oktober 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 24/Akta.Pid.Sus-TPK/2024/PN Kdi yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari yang menerangkan bahwa pada tanggal 8 Oktober 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Memori Banding tanggal 07 Oktober 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari tanggal 7 Oktober 2024 dan telah diserahkan Salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 8 Oktober 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari masing-masing kepada Terdakwa pada tanggal 9 Oktober 2024 dan kepada Penuntut Umum pada tanggal 10 oktober 2024;

Menimbang, bahwa Terdakwa selaku Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding hingga Musyawarah majelis tanggal 8 November 2024,

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kolaka Utara telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat sebagaimana yang ditentukan dalam undang-undang, maka Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara berpendapat bahwa permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 38 dari 68 halaman Putusan Nomor 25.PID.SUS-TPK/2024/PT KDI



Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan dalam memori bandingnya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara dan merupakan bagian tidak terpisahkan serta menjadi satu kesatuan dengan putusan ini, Penuntut Umum pada bagian akhir memori bandingnya memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima Permintaan Banding dari Penuntut Umum;
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Kdi tanggal 01 Oktober 2024, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut:
 - Menyatakan Terdakwa JAMALUDDIN, S.Sos Alias JAMAL Bin FARUKI, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat 1 huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana) sebagaimana dalam DAKWAAN PRIMAIR;
 - Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa JAMALUDDIN, S.Sos Alias JAMAL Bin FARUKI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) Tahun dan 6 (Enam) Bulan dengan dikurangkan masa penahanan yang telah dijalankan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan Pidana Denda sebesar Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (Enam) Bulan;
 - Menjatuhkan Pidana Tambahan kepada Terdakwa JAMALUDDIN, S.Sos Alias JAMAL Bin FARUKI berupa pembayaran uang pengganti sebesar Rp. 9.201.106.499,78 (Sembilan milyar dua ratus satu juta seratus enam ribu empat ratus sembilan puluh

Halaman 39 dari 68 halaman Putusan Nomor 25.PID.SUS-TPK/2024/PT KDI



sembilan rupiah tujuh puluh delapan sen), dengan ketentuan apabila uang pengganti sejumlah tersebut tidak dibayar paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dan jika terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana penjara selama 5 (Lima) Tahun;

3. Menguatkan Putusan Pengadilan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Kdi tanggal 01 Oktober 2024 untuk selebihnya.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kdi tanggal 1 Oktober 2024 dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum serta mengacu pada fakta hukum yang terungkap di persidangan maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya sudah didasarkan pada alasan yang tepat dan benar, karena itu diambil-alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding, kecuali mengenai pemidanaan, yaitu pidana penjara dan denda, mengenai nilai kerugian keuangan Negara dan mengenai nilai uang pengganti yang dibebankan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari dalam Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/PN Kdi tanggal 1 Oktober 2024 telah mengkonstatir fakta-fakta di persidangan dalam membuktikan perbuatan dan kesalahan Terdakwa dalam kapasitasnya selaku penyedia pekerjaan pematangan dan penyiapan lahan/lokasi Bandar Udara di Kolaka Utara pada Dinas Perhubungan Kabupaten Kolaka Utara Tahun Anggaran 2020 dan Tahun Anggaran 2021 berdasarkan kontrak Nomor 001/KONTRAK.PPK/DISHUB/XI/2020 tanggal 9 November 2020 berdasarkan fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar bulan Mei tahun 2020, terdakwa bermaksud untuk mengikuti lelang Pekerjaan Pematangan dan Penyiapan Lahan/Lokasi Bandar Udara Kolaka Utara pada Dinas Perhubungan Kabupaten Kolaka Utara Tahun Anggaran 2020 dan Tahun Anggaran 2021, akan tetapi perusahaan milik terdakwa tidak memiliki kualifikasi untuk melakukan pekerjaan tersebut;
- Bahwa Terdakwa selanjutnya meminjam perusahaan PT. MONODON PILAR NUSANTARA dari sdr. Ahmad melalui sdr. RIZAL (Alm.) agar dapat mengikuti tender tersebut dengan membayar *fee* kepada sdr. RIZAL (Alm.);
- Bahwa sdr. RIZAL (Alm.) bersama dengan Terdakwa atas persetujuan sdr. AHMAD membentuk Kantor Cabang PT. MONODON PILAR NUSANTARA di Kolaka, dan Terdakwa menjabat selaku Pimpinan Cabang;
- Bahwa Terdakwa guna menyusun Dokumen Penawaran Harga PT. MONODON PILAR NUSANTARA Cabang Kolaka Utara telah menerima Rincian Harga Perkiraan Sendiri (HPS) untuk pekerjaan tersebut yang telah disusun oleh saksi SOFYAN LAEMA selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) selang 1 (satu) hari setelah adanya pengumuman lelang pengadaan pekerjaan tersebut.
- Bahwa Terdakwa pada saat proses pemilihan penyedia telah mengajukan dokumen penawaran yang tidak benar, antara lain mengenai sewa peralatan dan personal tenaga ahli;
- Bahwa terdakwa selaku Pimpinan Cabang PT. MONODON PILAR NUSANTARA Cabang Kolaka ditetapkan sebagai pelaksana pekerjaan berdasarkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) dan Kontrak Nomor: 001/KONTRAK.PPK/DISHUB/XI/2020 tanggal 9 November 2020 dengan jangka waktu pelaksanaan 405 (empat ratus lima) hari kalender terhitung sejak tanggal 9 November 2020 sampai dengan 18 Desember 2021, dan waktu pemeliharaan selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender, dengan nilai kontrak Rp.41.158.895.000,- (empat puluh satu milyar seratus lima puluh delapan juta delapan ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah)

Halaman 41 dari 68 halaman Putusan Nomor 25.PID.SUS-TPK/2024/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa selaku pelaksana pekerjaan tidak menggunakan tenaga ahli sesuai dengan kontrak dan tidak membuat gambar *as built* yang menjadi tanggungjawabnya, akan tetapi telah meminta saksi SOFYAN LAEMA untuk membuatnya dengan imbalan Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa terdakwa selaku penyedia melaksanakan pekerjaan pematangan dan penyiapan lahan/lokasi Bandar Udara Kolaka Utara pada Dinas Perhubungan Kabupaten Kolaka Utara Tahun Anggaran 2020 dan Tahun Anggaran 2021 tidak sesuai dengan kontrak, diantaranya perihal pemasangan dinding Sumuran Silinder menurut Kontrak harus menggunakan kayu perancah dan paku, akan tetapi terdakwa menggantinya dengan menggunakan cetakan beton silinder yang terbuat dari *fiber* dan perihal penggantian ini tidak dimasukkan kedalam CCO maupun Addendum Kontrak.
- Bahwa selain itu *sheet pile* yang terdakwa kerjakan sudah dalam kondisi bergeser serta dalam kondisi miring pada saat serah terima pekerjaan, dan untuk mengatasi kerusakan *sheet pile* tersebut disiasati dengan membangun talud pasangan batu dan beton cyclope di sepanjang lokasi tersebut yang tidak sesuai dengan Kontrak.
- Bahwa sekalipun pekerjaan tidak sesuai dengan kontrak ternyata Terdakwa bersama-sama dengan saksi SOFYAN LAEMA, saksi YUNUS, dan saksi MUSTAKDIR selaku konsultan pengawas telah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Fisik yang isinya tidak benar, dan pekerjaan tersebut telah diserahkan-terimakan kepada sdr. SOFYAN LAEMA selaku PPK yang diketahui oleh saksi Yunus selaku Pengguna Anggaran Dinas Perhubungan Jo. Berita Acara Serah Terima No. 003/BAST/DISHUB/ 11/2021 tertanggal 09 November 2021, serta Terdakwa telah pula menerima pembayaran 100%, yaitu sejumlah Rp.41.158.895.000,- (empat puluh satu milyar seratus lima puluh delapan juta delapan ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah) termasuk PPN dan PPH;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut telah menimbulkan kerugian Keuangan Negara Atau Perekonomian Negara sebesar Rp9.351.106.499,78 (Sembilan milyar tiga ratus lima puluh satu juta

Halaman 42 dari 68 halaman Putusan Nomor 25.PID.SUS-TPK/2024/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seratus enam ribu empat ratus sembilan puluh sembilan rupiah tujuh puluh delapan sen) sesuai dengan Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Negara/Daerah Atas Pekerjaan Pematangan dan Penyiapan Lahan/Lokasi Bandar Udara Kolaka Utara Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Kolaka Utara Tahun Anggaran 2020 dan 2021 dari BPK RI Nomor 07/LHP/XXI/02/2024 tanggal 20 Februari 2024;

- Bahwa berdasarkan isi Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif dari BPK RI tersebut diketahui bahwa sebagai tindak lanjut atas kerugian keungsan Negara itu maka pada tanggal 22 Agustus 2022, PT. MONODON PILAR NUSANTARA Cabang Kolaka telah menyetorkan senilai Rp788.885.920,00 (tujuh ratus delapan puluh delapan juta delapan ratus delapan puluh lima ribu sembilan ratus dua puluh rupiah);

Menimbang bahwa selain itu Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari telah dengan tepat mempertimbangkan kualifikasi perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, yaitu dengan menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi dalam dakwaan alternatif Pertama Primer Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-undang R.I Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang R.I Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari tentang kualifikasi perbuatan Terdakwa dalam perkara ini, selain terpenuhinya unsur Pasal 2 ayat (1) tersebut, juga telah sesuai dengan isi Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 karena nilai kerugian keuangan negaranya diatas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan hukum tersebut, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara sependapat tentang kualifikasi perbuatan yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa adalah Pasal 2 ayat (1) Undang-undang R.I Nomor 31 Tahun 1999 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang R.I Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa terkait dengan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, maka menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada hal yang baru dan apa yang dikemukakan oleh Penuntut Umum sebagai alasan banding tersebut telah dipertimbangkan secara tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari dalam perkara ini pada kenyataannya telah pula mempertimbangkan unsur-unsur pasal yang didakwakan dengan memutuskan perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dakwaan alternatif Pertama Primer Pasal 2 ayat (1) Undang-undang R.I Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang R.I Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan sebagai sarana balas dendam terhadap pelaku tindak pidana, melainkan berfungsi sebagai sarana pembinaan dan korektif yang bersifat represif, sedangkan bagi masyarakat mempunyai fungsi preventif, artinya masyarakat agar tidak melakukan perbuatan seperti Terdakwa. Dengan demikian lamanya pidana yang dijatuhkan harus adil, yaitu baik bagi Terdakwa maupun bagi perasaan hukum masyarakat.

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang telah meminjam bendera Perusahaan PT. MONODON PILAR NUSANTARA dari sdr. Ahmad melalui sdr. RIZAL (Alm.) dengan membayar *fee* kepada sdr. RIZAL (Alm.) tentunya bermaksud agar Terdakwa dapat mengikuti tender Pekerjaan Pematangan dan Penyiapan Lahan/Lokasi Bandar Udara Kolaka Utara Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Kolaka Utara Tahun Anggaran 2020 dan

Halaman 44 dari 68 halaman Putusan Nomor 25.PID.SUS-TPK/2024/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021, karena Perusahaan Terdakwa tidak memiliki kualifikasi untuk mengerjakan pekerjaan tersebut;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut juga bertujuan agar PT. MONODON PILAR NUSANTARA menjadi pemenang tender dan Terdakwalah yang akan mengerjakannya dengan maksud memperoleh keuntungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi melihat bahwa Terdakwa sejak awal sudah memiliki *mensrea* atau niat jahat untuk memperkaya diri atau orang lain atau suatu korporasi;

Menimbang, bahwa Terdakwa selaku kontraktor pada kenyataannya tidak melaksanakan pekerjaan sesuai dengan isi kontrak, akan tetapi sekalipun demikian Terdakwa bersama-sama dengan saksi SOFYAN LAEMA, saksi YUNUS, dan saksi MUSTAKDIR selaku konsultan pengawas telah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Fisik yang isinya tidak benar; dan pekerjaan yang tidak sesuai kontrak itu telah diserahkan oleh Terdakwa kepada saksi SOFYAN LAEMA selaku PPK;

Menimbang, bahwa Terdakwa atas pekerjaannya yang tidak sesuai kontrak itu pada akhirnya telah menerima pembayaran 100% dari pihak Dinas Perhubungan Kabupaten Kolaka Utara dan pekerjaan yang tidak sesuai dengan kontrak itu adalah senilai Rp.9.351.106.499,78 (Sembilan milyar tiga ratus lima puluh satu juta seratus enam ribu empat ratus sembilan puluh sembilan rupiah tujuh puluh delapan sen);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan hukum tersebut maka putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari dengan *straaformat* sebagaimana tersebut dalam amar putusannya menurut Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, yaitu mengenai pidana penjara dan denda adalah kurang tepat dan tidak memenuhi rasa keadilan sehingga perlu untuk diubah dengan tetap berpedoman pada Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang bahwa dengan berpedoman kepada PERMA RI Nomor 1 Tahun 2020 dan dengan mempertimbangkan secara berurutan kategori

Halaman 45 dari 68 halaman Putusan Nomor 25.PID.SUS-TPK/2024/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerugian Negara, tingkat kesalahan Terdakwa, dampak dan keuntungan yang diterima Terdakwa, maka penjatuhan pidananya akan lebih proporsional dan ada kesebandingan antara tingkat kesalahan terdakwa dengan berat ringannya atau besaran pidana yang dijatuhkan

Menimbang, bahwa mengenai nilai kerugian keuangan Negara akibat perbuatan Terdakwa menurut Hakim Tingkat Pertama adalah sejumlah Rp9.869.679.523,78 (Sembilan milyar delapan ratus enam puluh sembilan juta enam ratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus dua puluh tiga rupiah tujuh puluh delapan sen), yaitu mengacu pada Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Negara/Daerah Atas Pekerjaan Pematangan dan Penyiapan Lahan/Lokasi Bandar Udara Kolaka Utara Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Kolaka Utara Tahun Anggaran 2020 dan 2021 dari BPK RI Nomor 07/LHP/XXI/02/2024 tanggal 20 Februari 2024;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memperhatikan dengan seksama terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI tersebut, ternyata nilai Rp9.869.679.523,78 (Sembilan milyar delapan ratus enam puluh sembilan juta enam ratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus dua puluh tiga rupiah tujuh puluh delapan sen) itu merupakan gabungan dari nilai kerugian keuangan Negara pada pekerjaan pematangan penyiapan lahan/Lokasi bandar udara Kolaka Utara sejumlah Rp9.351.106.499,78 (Sembilan milyar tiga ratus lima puluh satu juta seratus enam ribu empat ratus sembilan puluh sembilan rupiah tujuh puluh delapan sen) dan pekerjaan pengawasan penyiapan Lokasi lahan Pembangunan fasilitas pemerintah sejumlah Rp518.573.024,00 (lima ratus delapan belas juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu dua puluh empat rupiah);

Menimbang, bahwa kedua pekerjaan tersebut berasal dari kontrak yang berbeda dengan subyek yang berbeda sehingga pertanggungjawabannya pun berbeda pula, yaitu :

- Nilai kerugian keuangan negara sejumlah Rp9.351.106.499,78 (Sembilan milyar tiga ratus lima puluh satu juta seratus enam ribu empat ratus sembilan puluh sembilan rupiah tujuh puluh delapan sen) adalah tanggungjawab Terdakwa selaku pelaksana pekerjaan;

Halaman 46 dari 68 halaman Putusan Nomor 25.PID.SUS-TPK/2024/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nilai kerugian keuangan Negara sejumlah Rp518.573.024,00 (lima ratus delapan belas juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu dua puluh empat rupiah) adalah tanggungjawab saksi MUSTAKDIR selaku konsultan pengawas dari CV. NURSALEH ABADI KONSULTAN;

Menimbang, bahwa dari nilai kerugian negara akibat perbuatan Terdakwa tersebut telah dilakukan tindak lanjut, yaitu pada tanggal 22 Agustus 2022, PT. MONODON PILAR NUSANTARA Cabang Kolaka telah menyetorkan senilai Rp788.885.920,00 (tujuh ratus delapan puluh delapan juta delapan ratus delapan puluh lima ribu sembilan ratus dua puluh rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa telah memberikan uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada saksi IR. YUNUS M.Si selaku Pengguna Anggaran, dan kepada saksi SOFYAN LAEMA ST, MM sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk pembuatan gambar *as built*.

Menimbang, bahwa oleh karena saksi IR. YUNUS M.Si dan saksi SOFYAN LAEMA ST, MM, keduanya juga menjadi terdakwa dalam berkas terpisah, maka uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) menjadi tanggungjawab saksi IR. YUNUS M.Si dan uang sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) menjadi tanggungjawab saksi SOFYAN LAEMA ST, MM;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka nilai uang pengganti yang menjadi tanggungjawab Terdakwa harus diperhitungkan sebagai berikut :

- Nilai pekerjaan yang tidak sesuai kontrak adalah sejumlah Rp9.351.106.499,78 (Sembilan milyar tiga ratus lima puluh satu juta seratus enam ribu empat ratus sembilan puluh sembilan rupiah tujuh puluh delapan sen) dikurangi Rp788.885.920,00 (tujuh ratus delapan puluh delapan juta delapan ratus delapan puluh lima ribu sembilan ratus dua puluh rupiah) dan dikurangi lagi Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), yaitu sejumlah Rp8.412.220.579,78 (delapan milyar empat ratus dua belas juta dua ratus dua puluh ribu lima ratus tujuh puluh sembilan rupiah tujuh puluh delapan sen);
- Bahwa oleh karena untuk pekerjaan yang tidak sesuai kontrak, telah dibayar dan sudah diterima oleh Terdakwa, maka kepada Terdakwa harus

Halaman 47 dari 68 halaman Putusan Nomor 25.PID.SUS-TPK/2024/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibebani untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp8.412.220.579,78 (delapan milyar empat ratus dua belas juta dua ratus dua puluh ribu lima ratus tujuh puluh sembilan rupiah tujuh puluh delapan sen);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat Putusan Pengadilan Negeri Kendari sepanjang mengenai penjatuhan pidana tambahan untuk membayar uang pengganti perlu diubah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut pula, maka alasan banding dari Penuntut Umum selaku Pembanding dalam memori bandingnya harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan Rutan, dan menurut ketentuan dalam Pasal 21 jo Pasal 27 ayat (1) dan (2), Pasal 193 ayat (2) b jo Pasal 197 huruf k jo Pasal 242 KUHP tidak ada alasan bagi Terdakwa untuk dikeluarkan dari tahanan, maka Terdakwa tetap berada dalam tahanan dan masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara untuk kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. Mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kdi tanggal 1 Oktober 2024 yang dimintakan banding, sehingga amar selengkapanya

Halaman 48 dari 68 halaman Putusan Nomor 25.PID.SUS-TPK/2024/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa Jamaluddin, S.Sos Alias Jamal Bin Faruki** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**secara bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi**" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa Jamaluddin, S.Sos Alias Jamal Bin Faruki** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dan pidana denda sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
3. Menjatuhkan Pidana Tambahan kepada **Terdakwa Jamaluddin, S.Sos Alias Jamal Bin Faruki** untuk membayar uang pengganti sejumlah **Rp8.412.220.579,78 (delapan milyar empat ratus dua belas juta dua ratus dua puluh ribu lima ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah tujuh puluh delapan sen)** dan jika **Terpidana Jamaluddin, S.Sos Alias Jamal Bin Faruki** tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dan jika terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun ;**
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani **Terdakwa Jamaluddin, S.Sos Alias Jamal Bin Faruki** dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
5. Menetapkan **Terdakwa Jamaluddin, S.Sos Alias Jamal Bin Faruki** tetap ditahan.
6. Menetapkan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) bundel FC Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 001/KONTRAK-PPK/DISHUB/XI/2020 tanggal 9 Nopember 2020 pekerjaan Pematangan dan Penyiapan lokasi/lahan Bandar Udara Kolaka Utara;
2. 1 (satu) bundel ASLI Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 002/KONTRAK-PPK/DISHUB/XI/2020 tanggal 9 Nopember 2020 pekerjaan Pengawasan Penyiapan lokasi/lahan Bandar Udara Kolaka Utara;
3. 1 (satu) bundel FC Laporan Akhir PT. Portal Engineering Perkasa;
4. 1 (satu) bundel FC Berita Acara Pembayaran Nomor : 5/BAP-DISHUB/APBD/XI/2020 tanggal 27 Nopember 2020;
5. 1 (satu) lembar FC Surat Permohonan Contract Change Order (CCO) dari PT. MPN kepada PPK;
6. 1 (satu) bundel FC Addendum I (CCO-I) tanggal 2 Maret 2021;
7. 1 (satu) bundel FC Addendum II (Perubahan Nomor Rekening Pembayaran) tanggal 3 Desember 2021;
8. 1 (satu) bundel FC As Built Drawing Pematangan dan Penyediaan lahan/lokasi Bandar Udara Kolaka Utara TA. 2020/2021.
9. 1 (satu) bundel FC Rekapitulasi Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dari PPK;
10. 1 (satu) bundel FC sertifikat Lokasi Bandar Udara Kolaka Utara;
11. 1 (satu) bundel FC Formulir Standar untuk perekaman Analisa masing-masing harga satuan;
12. 1 (satu) bundel FC Daftar Kuantitas dan Harga Engineer Estimate (EE);
13. 1 (satu) bundel FC Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pekerjaan Multiyears TA 2020/2021;
14. 1 (satu) bundel FC Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya (RAB) – Penyusunan Rincian Teknik Terinci (RTT);
15. 1 (satu) lembar FC Sertifikat Ahli Pengadaan Nasional Atas Nama Sofyan, ST.

Halaman 50 dari 68 halaman Putusan Nomor 25.PID.SUS-TPK/2024/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



16. 1 (satu) Bundel FC Petikan Keputusan Bupati Kolaka Utara Nomor : 821.2/10 Tahun 2017; (Pengangkatan Sofyan, ST., MM sebagai Kasubag Keuangan dan Penyusunan Program Dinas Perhubungan);
17. 1 (satu) Bundel FC Keputusan Kepala Dinas Perhubungan selaku Pengguna Anggaran Nomor 800/001.1/2020 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten Kolaka Utara atas nama Sofyan, ST;
18. 1 (satu) Bundel FC surat keterangan tanggung jawab mutlak (SKTJM).
19. 1 (satu) Bundel FC Surat tinjauan perubahan pekerjaan lapangan nomor :001/PPL/2021 Tanggal 23 Februari 2021;
20. 1 (satu) Lembar FC Surat Persetujuan Kelayakan Lokasi Bandar Udara Baru Kab. Kolaka Utara;
21. 1 (satu) Bundel FC Kepmen Nomor 58 Tahun 2021 Tentang Penetapan Lokasi Bandar Udara Di Kolut;
22. 1 (satu) Lembar FC Surat Tugas Rusli Pt Portal;
23. 1 (satu) Bundel FC Kontrak Penyusunan RTT BANDARA KOLUT;
24. 1 (satu) Bundel ASLI Laporan Akhir Pekerjaan Studi Kelayakan Pemilihan Lokasi dan Rencana Induk Bandar Udara Baru;
25. 1 (satu) Lembar FC Struktur Organisasi Dinas Perhubungan 2020 dan 2021;
26. 1 (satu) Bundel FC Peraturan Bupati Kolaka UTARA Nomor 49 Tahun 2015 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kab. Kolaka Utara;
27. 1 (satu) bundel FC Laporan Harian PT. Monodon Pilar Nusantara dari tanggal 16 Nopember 2020 s/d tanggal 24 Nopember 2021;
28. 1 (satu) Bundel FC Surat Pernyataan PT. Agsya Karya Sejahtera tanggal 24 September 2021; (satu group/management keuangan);

Halaman 51 dari 68 halaman Putusan Nomor 25.PID.SUS-TPK/2024/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. 1 (satu) Bundel FC Surat Pernyataan PT. Agsya Karya Sejahtera tanggal 16 Juni 2020; (satu group/management keuangan;
30. 1 (satu) Bundel FC Akta Notaris Pembukaan Kantor Cabang dan Pemberian Kuasa PT. MPN No. 15 tanggal 25 Agustus 2020;
31. 1 (satu) Bundel FC bukti penyetoran kelebihan pembayaran atas Pekerjaan Pematangan/Penyediaan Lokasi Bandar Udara Kolaka Utara pada Dinas Perhubungan Kabupaten Kolaka Utara T.A. 2021 oleh PT. MPN sejumlah Rp.788.885.920,-;
32. 1 (satu) bundel ASLI Laporan Pengawasan Teknis Pekerjaan CV. Nur Saleh Abadi;
33. 1 (satu) bundel ASLI Surat Perjanjian (Kontrak Tahap I) Nomor : 002.1/KONTRAK-PPK/DISHUB/XI/2020 tanggal 9 Nopember 2020;
34. 1 (satu) bundel FC Berita Acara Pembayaran Nomor : 001/BAP-DISHUB/APBD/IV/2021 tanggal 23 April 2021;
35. 1 (satu) bundel FC Laporan Akhir Pekerjaan Pematangan dan Penyediaan lahan/lokasi Bandar Udara Kolaka Utara TA. 2020/2021;
36. 1 (satu) Bundel FC Shop Drawing Pekerjaan Pematangan dan Penyediaan lahan/lokasi Bandar Udara Kolaka Utara TA. 2020/2021 Kontraktor PT. MPN;
37. 1 (satu) bundel FC Laporan Hasil Pengujian tanggal 24 Pebruari 2022;
38. 1 (satu) bundel FC Laporan Hasil Pengujian tanggal 26 Pebruari 2021;
39. 1 (satu) bundel FC Rekapitulasi Kuantitas dan Harga dari Konsultan Pengawas CV. Nur Saleh Abadi;
40. 1 (satu) bundel FC Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Pemborongan SUBKONTRAK Nomor : 01/MPN/SUBKON/II/2021 tanggal 19 Januari 2021;
41. 1 (satu) bundel ASLI Rekening Koran Giro Bank Sultra atas nama CV. Mallebu periode 01 Nopember 2021 s/d 31 Desember 2021;

Halaman 52 dari 68 halaman Putusan Nomor 25.PID.SUS-TPK/2024/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

42. 1 (satu) Bundel FC Mutual Check 100 % tanggal 17 Nopember 2021 dan Mutual Check 50 % tanggal 22 Juli 2021;
43. 1 (satu) Bundel FC Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Subkontrak dari Masdar selaku Direktur CV. Mallebu kepada Jamaluddin, S.Sos selaku Pimpinan Cabang PT. MPN tanggal 19 Nopember 2021;
44. 1 (satu) bundel FC Sertifikat Produksi Voncrete Corrugated Sheet Pile yang dipesan oleh PT. MPN kepada PT. Wijaya Karya Beton, Tbk.;
45. 1 (satu) lembar FC Penawaran harga sheet pile dari PT. Wika Beton kepada PT. MPN tanggal 28 Desember 2020;
46. 1 (satu) bundel FC Surat Perjanjian Jual Beli pengadaan sheet pile Nomor : TP.02.01/WB-1F.002/21 tanggal 12 Januari 2021;
47. 1 (satu) bundel Fc Amandemen Pertama Surat Perjanjian Jual Beli pengadaan sheet pile Nomor : TP.02.01/WB-1F.002/21.P1 tanggal 9 Pebruari 2021;
48. 1 (satu) bundel Fc Berita Acara Serah Terima pekerjaan pengadaan corrugated dheet pile tanggal 13 Agustus 2021;
49. 1 (satu) bundel Fc Monitor Pembayaran Termyn sheet pile dan bukti transfer kepada PT. Wika Beton dari Agus Salim;
50. 1 (satu) bundel Fc Surat Pengantar Dokumen Nomor : SE.01.01/WB-1F.0009/2021 kepada PT. MPN tanggal 18 Januari 2021;
51. 1 (satu) bundel Fc Surat Pengantar Dokumen Nomor : Se.01.01/WB-1F 0232/2021 kepada PT. MPN tanggal 27 Mei 2021;
52. 1 (satu) lembar Surat dari PT. Wika Beton kepada Bapak Rais perihal Informasi Harga Produk Sheet Pile WIKA Beton dan Daftar Kuantitas dan Harga Harga Perkiraan Sendiri (HPS);
53. 1 (satu) bundel Fc Surat Perintah Pencairan Dana sejumlah Rp.6.173.834.250,- ke Rekening PT. MPN;
54. 1 (satu) bundel Fc Surat Perintah Pencairan Dana sejumlah Rp.17.492.530.370,- ke Rekening PT. MPN;

Halaman 53 dari 68 halaman Putusan Nomor 25.PID.SUS-TPK/2024/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



55. 1 (satu) bundel Fc Surat Perintah Pencairan Dana sejumlah Rp.17.492.530.380 ke Rekening CV. Mallebu dan Surat Kuasa pengalihan pencairan dana dari PT. MPN kepada CV. Mallebu;
56. 1 (satu) bundel FC Surat Perintah Kerja pemancangan darat Turap Sheet Pile panahan tanah dari Jamaluddin (PT. MPN) kepada Abdul Rahman tanggal 18 Juni 2021;
57. 1 (satu) bundel FC Akta Notaris & PPAT Pendirian Perseroan Komanditer CV. Standard Pile Nomor 2 tanggal 1 April 2003;
58. 1 (satu) Bundel ASLI Summary Report pekerjaan Kontruksi pematangan dan penyiapan lahan/lokasi Bandar Udara Kolaka Utara;
59. 1 (satu) bundel Fc Dokumen Lelang PT. Monodon Pilar Nusantara;
60. 1 (satu) bundel FC Dokumen Lelang PT. Pilar Indonesia;
61. 1 (satu) bundel FC Dokumen PT. Fraya Putri Appanang;
62. 1 (satu) bundel FC Dokumen PT. Cahaya Bangun Indonesia;
63. 1 (satu) bundel FC Dokumen PT. Alam Lintas Indonesia;
64. 1 (satu) bundel FC Dokumen PT. Sukses Karya Bersama Internusa;
65. 1 (satu) lembar FC Sertifikat Ahli Pengadaan Nasional Atas Nama Syahrudin Baso;
66. 1 (satu) bundel FC Keputusan Bupati Kolaka Utara Nomor : 926/292/Tahun 2019 tentang Pembentukan Kelompok Kerja dan Pengangkatan Anggota Kelompok Kerja Pengadaan Barang/Jasa Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Utara;
67. 1 (satu) bundel FC Rincian Penawaran Peserta Lelang Pekerjaan Pematangan dan Penyiapan Lahan/Lokasi Bandar Udara Kolaka Utara;
68. 1 (satu) eksemplar FC Rincian HPS yang tayang pada LPSE;
69. 1 (satu) bundel FC Dokumen Pemilihan untuk Pekerjaan Kontruksi Pematangan dan Penyiapan Lahan/Lokasi Bandar Udara Kolaka Utara;



70. 1 (satu) bundel FC kerangka acuan kerja (KAK) rancangan teknik terinci (RTT) fasilitas sisi darat dan fasilitas sisi udara Bandar udara kolaka utara;
71. 1 (satu) bundel FC standar dokumen pemilihan (dokumen kualifikasi) nomor: 06-LU/PKN/2019 untuk pengadaan terbitan laporan penyusunan RTT sisi udara dan sisi darat;
72. 1 (satu) bundel FC LKPP nomor: 9 tahun 2018 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang/jasa melalui penyedia;
73. 1 (satu) Bundel FC peraturan menteri PUPR RI Nomor: 14 tahun 2020 tentang standard dan pedoman pengadaan jasa konstruksi melalui penyedia;
74. 1 (satu) bundel FC dokumen kualifikasi PT. Portal engineering perkasa;
75. 1 (satu) bundel FC berita acara serah terima dokumen hasil pemilihan pengadaan barang/jasa nomor: 5/P.57/PK/KU/X/2020 tanggal 19 Okt 2020;
76. 1 (satu) bundel FC penyampaian hasil pemilihan pengadaan barang/Jasa nomor: 6.6/PJKN-BPBJ/IX/2019;
77. 5 (lima) bundel Fc Surat Perjanjian Penyewaan Peralatan oleh PT. MPN (Jamaluddin) dengan Dinas PUPR Kolaka Utara;
78. 1 (satu) Lembar ASLI penggunaan alat pada dinas pekerjaan umum dan penataan ruang pada pekerjaan bandara 2021;
79. 1 (satu) Bundel Fc Petikan Keputusan Bupati Kolaka Utara Nomor : 821.2/152 Tahun 2018; (Pengangkatan Ir. Junus, Msi sebagai Kadis Perhubungan);
80. 3 (tiga) bundel ASLI Dokumen Foto-Foto Kegiatan Pekerjaan Pematangan dan Penyiapan Lahan/Lokasi Bandar Udara Kolaka Utara;
81. 1 (satu) lembar FC Permohonan Evaluasi Rencana Teknik Terperinci Bandara Udara Kolut;
82. 1 (satu) Bundel FC Undangan Rapat RTT Via Zoom;
83. 1 (satu) bundel FC Penyampaian Data Tambahan Perencanaan Bandar Udara Baru Kab. Kolut;



84. 1 (satu) Bundel FC Perpres No 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 Sd 2024;
85. 1 (satu) Lembar FC Permohonan Asistensi Dan Presentasi Rtt Sisi Udara Dan Sisi Darat Bandar Udara;
86. 1 (satu) bundel FC SKPD Bandar Udara Tahun 2020;
87. 1 (satu) bundel FC SKPD Bandara Udara Tahun 2021;
88. 1 (satu) bundel FC Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kolaka Utara Nomor 800/001.2/2020 tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Kabupaten Kolaka Utara Tahun Anggaran 2020 atas nama Andi Syamsul Bachri, ST;
89. 1 (satu) bundel FC Berita Acara Pengambilan Sumpah Jabatan Taharuddin Sebagai Kabag Adm Pembangunan;
90. 1 (satu) bundel FC Permendagri 133 Tahun 2018 Ttg TGR;
91. 1 (satu) bundel FC Kepbupati Tentang Tim Evaluasi Kewajaran Dan Pemborosan;
92. 1 (satu) bundel FC Risalah rapat (komisi II) tentang kegiatan RKA APBD perubahan kabupaten kolaka utara tahun anggaran 2020 atas nama Mustamrin Saleh, SP. 31 agustus 2020;
93. 1 (satu) bundel FC risalah rapat badan anggaran tentang persetujuan pekerjaan multiyear untuk pekerjaan pematangan dan penyiapan lahan/ lokasi Bandar udara kolaka utara tahun 2020-2021 atas nama Buhari, S.kel, M.Si. 10 agustus 2020;
94. 1 (satu) bundel FC risalah rapat badan anggaran TAPD dan tim banggar DPRD kab. Kolaka utara tentang penambahan masa pembayaran pinjaman daerah kab. Kolaka utara pada BPD sultra atas nama Buhari, S.kel. M.Si. 19 Okt 2020;
95. 1 (satu) bundel FC risalah rapat badan anggaran TAPD dan tim banggar DPRD kab. Kolaka utara tentang penambahan masa pembayaran pinjaman daerah kab. Kolaka utara pada BPD daerah sultra atas nama Buhari, S.kel. M.Si. 23 Okt 2020;



96. 1 (satu) bundel FC putusan gubernur sultra nomor : 446 tahun 2019 tentang peresmian pemberhentian dan pengangkatan anggota DPRD kab. Kolaka utara masa jabatan 2019-2024;
97. 1 (satu) bundel FC keputusan DPRD nomor : 06/DPRD/2020 tentang persetujuan penambahan masa pembayaran pinjaman daerah kab. Kolaka utara pada PT. BPD Sultra;
98. 1 (satu) bundel FC surat tugas No. 090/98.8/DPRD-2022 atas nama Buhari, S.Kel., M.Si.;
99. 1 (satu) bundel FC keputusan gubernur sultra nomor: 615 tahun 2019 tentang peresmian pengangkatan pimpinan DPRD kab. Kolaka utara;
100. 1 (satu) bundel FC naskah kesepakatan pekerjaan multiyear nomor:180/142/2020. Nomor:06/DPRD/2020;
101. 1 (satu) bundel FC Berita Acara Persetujuan Pinjaman Daerah Kab. Kolaka Utara Tahun Anggaran 2020 Nomor : 01.a/DPRD/2019;
102. 1 (satu) bundel FC BKAD nomor: 900/213/BKAD-XII/202 tentang permohonan pencairan pinjaman daerah tahap I tahun 2020;
103. 1 (satu) bundel FC BKAD nomor: 900/124/BKAD-IV/2021 tentang permohonan pencairan pinjaman daerah tahap I tahun 2021;
104. 1 (satu) bundel FC BKAD nomor: 900/347/BKAD-VI/2021 tentang permohonan pencairan pinjaman daerah tahap III tahun 2021;
105. 1 (satu) bundel FC sertifikat pertanahan HAK PAKAI nomor: 00003 desa kalu-kaluku;
106. 1 (satu) bundel FC sertifikat pertanahan HAK PAKAI nomor: 00004 desa kalu-kaluku;
107. 1 (satu) bundel FC sertifikat pertanahan HAK PAKAI nomor: 00007 desa Lametuna;
108. 1 (satu) bundel FC sertifikat pertanahan HAK PAKAI nomor: 00008 desa lametuna;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

109. 1 (satu) bundel FC sertifikat pertanahan HAK PAKAI nomor: 00009 desa Lametuna;
110. 1 (satu) bundel FC sertifikat pertanahan HAK PAKAI nomor: 00010 desa Lametuna;
111. 1 (satu) bundel FC sertifikat pertanahan HAK PAKAI nomor: 00011 desa Lametuna;
112. 1 (satu) bundel FC sertifikat pertanahan HAK PAKAI nomor: 00012 desa Lametuna;
113. 1 (satu) bundel FC posisi utang kepada lembaga keuangan bank (LKB)-BUMD-jangka menengah per 31 Des 2021;
114. 1 (satu) bundel FC rekap pembayaran langsung Rp. 10.687.267.294,00;
115. 1 (satu) bundel FC rekap pembayaran langsung Rp. 24.368.650.002,00;
116. 1 (satu) bundel FC surat menteri dalam negeri nomor: 979/4949/SJ tentang pertimbangan usulan pinjaman daerah pemerintah kab. Kolaka utara TA 2020;
117. 1 (satu) bundel FC salinan akta notaris A.Widya Arung Raya, S.H., M.Kn tentang perjanjian kredit nomor: 221 tanggal 16 okt 2020;
118. 1 (satu) bundel FC Daftar Nama Pemilik Lahan dan Tanaman Lokasi Tambahan Untuk Pembangunan Bandara;
119. 1 (satu) bundel FC Petikan Putusan Bupati Kolaka Utara Nomor: 821.2/119 Tahun 2010 Tanggal 03 Juni 2012 Tentang Pengangkatan PNS An Mohammad Fadli, S.T., M.T menjadi Pj. Kasubid, Prasarana Wilayah Bappeda & PM;
120. 1 (satu) bundel FC Petikan Putusan Bupati Kolaka Utara Nomor: 821.2/89 Tahun 2014 Tanggal 18 Maret 2014 Tentang Pengangkatan PNS An Mohammad Fadli, S.T., M.T menjadi Kabid. Fisik dan Prasarana Wilayah BAPPEDA;
121. 1 (satu) bundel FC Petikan Putusan Bupati Kolaka Utara Nomor: 821.2/234 Tahun 2016 Tanggal 30 Desember 2016 Tentang Pengangkatan PNS An Mohammad Fadli, S.T., M.T menjadi

Halaman 58 dari 68 halaman Putusan Nomor 25.PID.SUS-TPK/2024/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Bidang Infrastruktur & Pengembangan Wilayah Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah;

- 122.** 1 (satu) bundel FC Petikan Putusan Bupati Kolaka Utara Nomor: 821.2/16 Tahun 2021 Tanggal 20 Januari 2021 Tentang Pengangkatan PNS An Mohammad Fadli, S.T., M.T menjadi Sekertaris pada Perencanaan Pembangunan Daerah;
- 123.** 1 (satu) lembar FC Surat Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia Nomor : B-1021/M.Sesneg/HL.02.02/11/2018 Tanggal 30 November;
- 124.** 1 (satu) bundel FC Peraturan Bupati Kolaka Utara Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab Kolaka Utara;
- 125.** 1 (satu) bundel FC Pemaparan Kesiapan Pembangunan Bandara Kolaka Utara Provinsi Sulawesi Tenggara Dalam Rangka Mendukung Target RPJMN 2020-2024;
- 126.** 1 (satu) FC bundel FC Surat Direktur Jendral Perhubungan Udara Nomor : AU/101/1/15/djpu.dbu.2013 Tanggal 2 Maret 2018 Perihal Tanggapan Terhadap Permohonan Evaluasi dan Persetujuan Kelayakan Bandar Udara Baru;
- 127.** 1 (satu) FC bundel FC Surat Direktur Bandar Udara Nomor : AU/04/0009/DBU/V/2019 Tanggal 14 Mei 2019 Perihal Evaluasi Persetujuan Kelayakan Rencana Bandar Udara di Kab. Kolaka Utara;
- 128.** 1 (satu) bundel FC Surat Direktur Bandar Udara Nomor : AU.104/0030/DBU/X/2019 Tanggal 04 Oktober 2019 Perihal Tanggapan Terhadap Permohonan dan Persetujuan Kelayakan Bandar Udara Baru;
- 129.** 1 (satu) bundel FC Keputusan Menteri Perhubungan Nomor SK.3237 Tahun 2020 Tanggal 22 Desember 2020 Tentang Pengangkatan melalui Penyesuaian/Inpassing dalam jabatan fungsional Inspektur Bandar Udara;
- 130.** 1 (satu) lembar FC Surat Bupati Nomor : 014/233/2022 Tanggal 19 September 2022 Permohonan Revisi KM 58 Tahun 2021;

Halaman **59** dari **68** halaman Putusan Nomor 25.PID.SUS-TPK/2024/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 131.** 1 (satu) bundel FC Laporan Kemajuan Pekerjaan Pengawasan Teknis Pekerjaan (50%) paket kegiatan Pengawasan Penyiapan Lokasi Lahan Pembangunan Fasilitas Pemerintah;
- 132.** 1 (satu) bundel FC foto dokumentasi Pengawasan Teknis Pekerjaan (50%) paket kegiatan Pengawasan Penyiapan Lokasi Lahan Pembangunan Fasilitas Pemerintah;
- 133.** 1 (satu) bundel FC Berita Acara Pembayaran Nomor : 002/BAP-DISHUB/APBD/VII/2020 Tanggal 26 Juli 2021 Pekerjaan Pengawasan Penyiapan Lokasi/Lahan Pembangunan Fasilitas Pemerintah;
- 134.** 1(satu) lembar ASLI surat Jaminan Uang Muka dari PT. ASURANSI UMUM VIDEI KENDARI (bertanggung jawab kepada PPK Dishub Kolaka Utara) sebagai Penjamin dan CV. NUR SALEH ABADI sebagai terjamin;
- 135.** 1 (satu) bundel FC Laporan Pendahuluan Penyusunan Rincian Teknik Terinci (RTT) Sisi Udara dan Sisi Darat Bandara Kolaka Utara;
- 136.** 1 (satu) bundel ASLI bahan Expose Pembangunan Bandar Udara Kolaka Utara dari Dinas Perhubungan Kolaka Utara;
- 137.** 1 (satu) bundel FC Berita Acara Pembayaran Nomor : 005/BAP-DISHUB/APBD/XII/2019 Pekerjaan Perencanaan Penyusunan Rincian Teknik Terinci (RTT) Sisi Udara dan Sisi Darat Bandar Udara Kolaka Utara Lokasi Kec. Kodeoha;
- 138.** 1 (satu) bundel FC Berita Acara Pembayaran Nomor : 002/Tim.Pemerik-Dishub/APBD-P/XII/2018 Tanggal 21 Desember 2018 Pekerjaan Penyusunan Dokumen Oseanografi Bandar Udara Kolaka Utara;
- 139.** 1 (satu) bundel ASLI Berita Acara Pembayaran Nomor 04/BAP-DISHUB/APBD/XI/2020 pekerjaan Penyusunan Dokumen Amdal Bandar Udara Kolaka Utara;
- 140.** 1 (satu) bundel FC Buku 3 Konsep Perbaikan Tanah / Pekerjaan Tanah Paket Pekerjaan Penyusunan Rincian Teknik Terinci (RTT) Sisi Udara dan Sisi Darat Bandar Udara Kolaka Utara Tahun 2019;

Halaman 60 dari 68 halaman Putusan Nomor 25.PID.SUS-TPK/2024/PT KDI



- 141.** 1 (satu) bundel ASLI Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan Hidup (KA-ANDAL) Pembangunan Bandar Udara di Desa Kalu-Kaluku dan Desa Lametuna Kec. Kodeoha Kab. Kolaka Utara Tahun 2020;
- 142.** 1 (satu) bundel ASLI Laporan Pra Akhir Pekerjaan Studi Kelayakan Pemilihan Lokasi dan Rencana Induk Bandar Udara Baru Tahun 2013;
- 143.** 1 (satu) bundel ASLI Studi Kelayakan Pemilihan Lokasi dan Rencana Induk Bandar Udara Baru Tahun 2013;
- 144.** 1 (satu) bundel ASLI Laporan Hasil Penyelidikan Geoteknik (Boring/SPT, Sondir/CPT dan Uji Laboratorium) Rencana Pembangunan Bandara Kabupaten Kolaka utara Tahun 2023;
- 145.** 1 (satu) bundel FC Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA SKPD) Dinas Perhubungan Tahun Anggaran 2020;
- 146.** 1 (satu) bundel FC As Built Drawing Bandar Udara Kabupaten Kolaka Utara;
- 147.** 1 (satu) bundel ASLI Buku Kas Umum (BKU) Bendahara Pengeluaran periode 1 Januari 2021 s/d 31 Desember 2021;
- 148.** 1 (satu) bundel ASLI Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KM 58 Tahun 2021 Tentang Penetapan Lokasi Bandar Udara di Kabupaten Kolaka Utara Provinsi Sulawesi Tenggara;
- 149.** 1 (satu) bundel FC Lampiran Rancangan Matriks Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2020;
- 150.** 1 (satu) bundel FC Album Gambar Studi Kelayakan Pemilihan Lokasi dan Rencana Induk Bandar Udara Baru Tahun 2013;
- 151.** 1 (satu) bundel FC Laporan Pendahuluan Studi AMDAL Pembangunan Bandar Udara Nomor : 823/UN.29.20/PPM/2020 Tanggal 4 Juni 2020 tentang Permohonan Pembayaran Tahap I
- 152.** 1 (satu) bundel ASLI Berita Acara Pembayaran Nomor 007/BAP-DISHUB/APBD/XII/2020 pekerjaan Penyusunan Dokumen Amdal Bandar Udara Kolaka Utara;



- 153.** 1 (satu) bundel ASLI Berita Acara Pembayaran Nomor 03/BAP-DISHUB/APBD/VI/2020 pekerjaan Penyusunan Dokumen Amdal Bandar Udara Kolaka Utara tanggal 22 Juni 2020;
- 154.** 1 (satu) bundel ASLI Berita Acara Pembayaran Nomor 002/KONTRAK-DISHUB/VI/2020 tanggal 3 Juni 2020 pekerjaan Penyusunan Dokumen Amdal Bandar Udara Kolaka Utara;
- 155.** 1 (satu) bundel FC Berita Acara Serah Terima Laporan Final Penyusunan Dokumen Amdal Bandar Udara Kolaka Utara Nomor : 002/BAST-AMDAL/DISHUB/XII/2020;
- 156.** 1 (satu) bundel FC Berita Acara Pembayaran Nomor 01/BAP-DISHUB/APBD/III/2020 tanggal 10 Maret 2020 pekerjaan Penyelidikan Tanah Bandar Udara Kolaka Utara;
- 157.** 1 (satu) bundel FC Buku 2 Penyelidikan / Pekerjaan Tanah Paket Pekerjaan Penyusunan Rincian Teknik Terinci (RTT) Sisi Udara dan Sisi Darat Bandar Udara Kolaka Utara Tahun 2019;
- 158.** 1 (satu) bundel FC Buku 1 Hasil dan Analisa Pengukuran Topografi Paket Pekerjaan Penyusunan Rincian Teknik Terinci (RTT) Sisi Udara dan Sisi Darat Bandar Udara Kolaka Utara Tahun 2019;
- 159.** 1 (satu) bundel ASLI Surat Perjanjian Kerja Sama Nomor : 001/KONT.SWK/DISHUB/APBD/II/2020 Tanggal 30 Januari 2020 Pekerjaan Penyelidikan Tanah Bandar Udara Kolaka Utara Tahun Anggaran 2020;
- 160.** 1 (satu) bundel FC Addendum-1 Hasil Evaluasi Pekerjaan Tambah/Kurang (CCO-1) tanggal 2 Maret 2021 atas kontrak pekerjaan Pematangan dan Penyiapan Lahan/Lokasi Bandar Udara Kolaka Utara
- 161.** 1 (satu) bundel ASLI Surat Perjanjian (Kontrak Tahap I) Nomor : 001.1/KONTRAK-PPK/DISHUB/XI/2020 pekerjaan Pematangan dan Penyiapan Lahan/Lokasi Bandar Udara Kolaka Utara;
- 162.** 1 (satu) bundel ASLI Laporan Antara Pekerjaan Studi Kelayakan Pemilihan Lokasi dan Rencana Induk Bandar Udara Baru Tahun 2013;



163. 1 (satu) bundel ASLI Keputusan Menteri Perhubungan Tentang Penetapan Lokasi Bandar Udara di Kabupaten Kolaka Utara Provinsi Sulawesi Tenggara;
164. 1 (satu) bundel FC Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024;
165. 1 (satu) bundel ASLI Surat Pernyataan tanah hak milik dan bukan tanah sengketa oleh saudara Syarifuddin B;
166. 2 (dua) bundel ASLI Surat Bupati Kolaka Utara Nomor: 014/253/2023 tanggal 3 Juli 2023 perihal Permohonan Revisi KM 58 Tahun 2021;
167. 3 (tiga) bundel ASLI Surat Bupati Kolaka Utara Nomor : 014/233/2023 tanggal 19 September 2022 perihal Permohonan Revisi KM 58 Tahun 2021;
168. 1 (satu) bundel ASLI buku rekening Bank Mandiri atas nama SOFYAN LAEMA;
169. 1 (satu) bundel FC rekening koran Bank BPD SULTRA atas nama SOFYAN;
170. 1 (satu) unit Laptop Merk Acer Aspire A514-54G warna hitam silver beserta cas;
171. 1 (satu) unit Handphone merk Vivo 1816 warna hitam dengan nomor SIM CARD 085342958009;
172. 1 (satu) unit CPU merk NIMITZ TR 5000 warna hitam ;
173. 1 (satu) Bundel FC rekening koran bank MANDIRI atas nama Ir. Junus;
174. 1 (satu) Bundel FC rekening koran bank BPD SULTRA atas nama Ir. Junus;
175. 1 (satu) unit HP Merk Samsung Galaxy A50s warna hitam dengan SIM CARD 08124212914;
176. 1 (satu) bundel rekening koran Bank Sultra atas nama MONODON PILAR NUSANTARA periode 1 November 2020 s/d 31 Januari 2022
177. 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A33 warna biru muda dengan nomor SIM card 085346143428;

Halaman 63 dari 68 halaman Putusan Nomor 25.PID.SUS-TPK/2024/PT KDI



- 178.** 1 (satu) Bundel FC Buku Direksi PT. MONODON PILAR NUSANTARA Kegiatan Pematangan dan Penyiapan Lahan Lokasi Bandar Udara Kolaka Utara;
- 179.** 1 (satu) Bundel Asli Rekapitulasi Kuantitas dan Harga Paket Pengawasan Penyiapan Lokasi Lahan Pembangunan Fasilitas Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara;
- 180.** 1 (satu) bundel ASLI rekening koran Bank SULTRA atas nama SYAHRUDDIN BASO Periode 01 November 2020 s.d 31 Januari 2022;
- 181.** 1 (satu) bundel ASLI rekening koran Bank BRI atas nama SYAHRUDDIN BASO Periode 01 Januari 2022 s.d 31 Januari 2022;
- 182.** 1 (satu) Bundel FC Akta Pendirian PT MONODON PILAR NUSANTARA Nomor 10 tanggal 18 Desember 2014;
- 183.** 1 (Satu) Bundel FC Bukti Penerimaan Negara tanggal 26 Agustus 2021;
- 184.** 1 (satu) Bundel FC Rekening Koran mandiri PT MONODON PILAR NUSANT tanggal 1 Agustus 2020 s/d 31 Oktober 2020;
- 185.** 1 (Satu) Bundel FC Rekening Koran BSI atas nama AHMAD tanggal 01 Januari 2021 s/d 27 Mei 2022;
- 186.** 1 (satu) Bundel FC Peraturan Bupati Kolaka Utara Nomor 9 Tahun 2017 tentang pedoman penataan dan pelaksanaan APBD Kabupaten Kolaka Utara;
- 187.** 1 (satu) Bundel FC Nota Kesepakatan antara pemerintah kabupaten kolaka utara dengan dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten kolaka utara nomor : 910/22/2019/08/DPRD/2019 tanggal 15 oktober 2019;
- 188.** 1 (satu) Bundel FC Nota Kesepakatan antara pemerintah kabupaten kolaka utara dengan dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten kolaka utara nomor : 910/17/2020/09/DPRD/2020 tanggal 30 Agustus 2020;
- 189.** 1 (satu) Bundel FC Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2020;



190. 1 (satu) Bundel FC Rencana Kerja Pemerintah Daerah Perubahan Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2020;
191. 1 (satu) bundel FC INVOICE Pekerjaan Pengawasan Penyiapan Lahan Pembangunan Fasilitas Pemerintah Tahun 2020-2021;
192. 1 (satu) bundel FC Rekening Koran BANK SULTRA CV NUR SALEH ABADI CONSULTANT tanggal 01 november 2020 s/d 31 januari 2022;
193. 1 (satu) bundel FC Rekening Koran BRI MUSTAKDIR SALEH tanggal 01 november 2020 s/d 31 mei 2022;
194. 1 (satu) Bundel FC Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Tahun Anggaran 2021;
195. 1 (satu) Bundel FC Buku 4 Spesifikasi Teknis Masing-Masing Prasarana paket pekerjaan penyusunan Rincian Teknik Terinci Sisi Udara dan Sisi Darat Bandara Kolaka Utara Tahun 2019;
- Dipergunakan dalam berkas perkara atas nama Saksi Ir. Junus, M.Si. Alias Pak Junus Anak Dari Saul Saso (Alm) ,(Terdakwa dalam berkas perkara terpisah).**

7. Menetapkan bukti surat yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa berupa :

1. T-1 : Foto copy Album Besar RTT Bandar Udara Kabupaten Kolaka Utara Sisi Darat dan Udara,
2. T-2 : Foto copy Kerangka Acuan Kerja yang memuat Rencana Teknik Terinci (RTT) Fasilitas sisi Darat dan sisi Udara Bandar Udara Kabupaten Kolaka Utara;
3. T-3 : Foto copy Gambar RTT Pematangan dan Penyiapan Lahan/Lokasi Bandar Udara Kabupaten Kolaka Utara;
4. T-4 : Foto copy Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kolaka Utara tahun Anggaran 2020 pada Bidang Pemerintahan Perhubungan Unit Organisasi Dinas Perhubungan perihal Kegiatan Penyiapan Lokasi Lahan Pembangunan Fasilitas Pemerintah.
5. T-5 : Foto Copy Surat Laporan Hasil Pengujian Kuat Tekan Beton Silinder Beton fc'30 oleh

Halaman 65 dari 68 halaman Putusan Nomor 25.PID.SUS-TPK/2024/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemohon PT. Monodon Pilar Nusantara pada Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Laboratorium Konstruksi,

6. T-6 : Foto copy Surat Persetujuan Pengawasan dan Pengamanan Proyek Strategis Daerah pada Dinas Perhubungan Kab.Kolaka Utara TA.2021 dan Surat Perintah Pengawasan dan Pengamanan oleh Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara.

7. T-7 : Photo Pengawasan dan Pengamanan yang dilakukan oleh Tim TP4D pada pengerjaan Pematangan dan Penyiapan Lahan Lokasi Bandar Udara Kabupaten Kolaka Utara;

8. T-8 : Foto copy As Built Drawing Pematangan dan penyiapan Lahan/Lokasi Banda Udara Kolaka Utara;

9. T-9 : Foto copy Bukti Kas Biaya perjalanan Dinas TP4D yang terdiri atas :

- a. Nomor 896/GU.215.0.00.0.00.17, pembayaran Biaya perjalanan Dinas dalam rangka koordinasi dan konsultasi tentang pelaksanaan kegiatan Pengamanan dan Pembangunan proyek strategis daerah pada kegiatan pematangan dan penyiapan lahan Lokasi Bandara Kolut an. Rijal Saputra,S.H.(Jaksa);
- b. Nomor 784/ GU.215.0.00.0.00.17, , pembayaran Biaya perjalanan Dinas dalam rangka monitoring dan konsultasi an. Noeradi, S.H.,M.H., /Jaksa Madya, Asisten Bidang Intelejen Kejati Sultra;
- c. Nomor 785 /GU.215.0.00.0.00.17, pembayaran biaya perjalanan dinas dalam rangka monitoring dan konsultasi an Sugiatno Mingano, S.H;
- d. Nomor 786/ GU.215.0.00.0.00.17, pembayaran biaya perjalanan dinas dalam rangka monitoring dan konsultasi an. Salemuddin Thalib, S.H.,M.H., (Jaksa Madya/ Kasi B Bidang Intelejen Kejati Sultra);
- e. Nomor 894/ GU.215.0.00.0.00.17, pembayaran Biaya perjalanan Dinas dalam rangka koordinasi dan konsultasi tentang pelaksanaan kegiatan Pengamanan dan Pembangunan proyek strategis daerah pada kegiatan pematangan dan penyiapan lahan Lokasi Bandara Kolut an. Teguh Imanto, S.H.,M.Hum (Kajari Kolaka Utara);
- f. Nomor 787/ GU.215.0.00.0.00.17, pembayaran Biaya perjalanan Dinas dalam rangka monitoring pekerjaan pematangan dan penyiapan lahan Lokasi Bandara Kolut an. Fadly A.Safaa, S.H.,M.H (Jaksa Muda/ Kasi A Bidang Intelejen Kejati Sultra);

Halaman 66 dari 68 halaman Putusan Nomor 25.PID.SUS-TPK/2024/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- g. Nomor 895/GU.215.0.00.0.00.17, pembayaran Biaya perjalanan dinas dalam rangka koordinasi dan konsultasi tentang pelaksanaan kegiatan Pengamanan dan Pembangunan proyek strategis daerah pada kegiatan pematangan dan penyiapan lahan Lokasi Bandara Kolut di Kendari an. Toyyib Hasan, S.H.,(Kasi Intelejen Kejari Kolaka Utara);
- h. Nomor 897/ GU.215.0.00.0.00.17, pembayaran Biaya perjalanan dinas dalam rangka koordinasi dan konsultasi tentang pelaksanaan kegiatan Pengamanan dan Pembangunan proyek strategis daerah pada kegiatan pematangan dan penyiapan lahan Lokasi Bandara Kolut di Kendari an. Teguh Imanto, S.H.,M.Hum (Kajari Kolaka Utara);
- i. Nomor 898/ GU.215.0.00.0.00.17, pembayaran Biaya perjalanan dinas dalam rangka koordinasi dan konsultasi tentang pelaksanaan kegiatan Pengamanan dan Pembangunan proyek strategis daerah pada kegiatan pematangan dan penyiapan lahan Lokasi Bandara Kolut di Kendari an. Toyyib Hasan, S.H.,M.H., (Kasi Intelejen Kejari Kolut);
- j. Nomor 899/ GU.215.0.00.0.00.17, pembayaran Biaya perjalanan dinas dalam rangka koordinasi dan konsultasi tentang pelaksanaan kegiatan Pengamanan dan Pembangunan proyek strategis daerah pada kegiatan pematangan dan penyiapan lahan Lokasi Bandara Kolut di Kendari an. Rijal Saputra, S.H., (Ajun Jaksa madya/Kasubsi Ekonomi, Keuangan dan pengamanan pada Kejari Kolut).
10. T-10 : Foto copy Surat Persetujuan Kelayakan Lokasi Bandar Udara Baru di Kabupaten Kolaka Utara;
11. T-11 : Foto Copy Perraturan Presiden Republik Indonesia No. 18 Tajhun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024;
12. T-12 : Foto copy Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia No.KM 58 Tahun 2021 Tentang Penetapan Lokasi Bandar Udara di Kabupaten Kolaka Utara Provinsi Sulawesi Tenggara.

Terlampir dalam berkas perkara.

8. Membebaskan kepada **Terdakwa Jamaluddin, S.Sos Alias Jamal Bin Faruki** membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi

Halaman **67** dari **68** halaman Putusan Nomor 25.PID.SUS-TPK/2024/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tenggara pada hari Senin tanggal 11 November 2024 oleh **I KETUT SUARTA, S.H., M.H.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara sebagai Hakim Ketua Majelis; **IMAM SUPRIYADI, S.H., M.H.**, **RINALDI TRIANDIKO, S.H., M.H.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, **DJODJO DJOHARI, S.H., M.H.**, dan **SRI WAHYU APRIANI, S.H.**, Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 14 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, serta **SYAMSUDDIN S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota

ttd

IMAM SUPRIYADI, S.H., M.H.

ttd

RINALDI TRIANDIKO, S.H., M.H.

ttd

DJODJO DJOHARI, S.H., M.H.

ttd

SRI WAHYU APRIANI, S.H.

Hakim Ketua Majelis

ttd

I KETUT SUARTA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

SYAMSUDDIN, S.H.